PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
# TAHUN 2024 - 2026

## SEKRETARIAT DAERAH
## KOTA PADANG PANJANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yakni Tahun 2024-2026.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Sekretarias Daerah ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Sekretariat Daerah. Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Sekretarias Daerah ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhir kata semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan. Aamiin.

Padang Panjang,  Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

**SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si.**

**Pembina Utama Madya / NIP. 19750331 199501 1 001**

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landasan Hukum Penyusunan ..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 7

1.4. Sistematika Penulisan ..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG ..... 9

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 9

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah ..... 17

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. ..... 40

2.5. Kelompok Sasaran Layanan ..... 41

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 42

3.1. Identifikasi Permasalahan ..... 42

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi. ..... 43

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 44

3.4. Isu-isu Strategis ..... 44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 46

4.2 Cascading ..... 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG ..... 50

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN

SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 53
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN ..... 60
BAB VIII PENUTUP ..... 61

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dengan berakhir masa jabatan Walikota dan Walikota Padang Panjang Fadly Amran dan Asrul Periode 2018-2023 pada Oktober 2023 maka Pemerintah Kota Padang Panjang memasuki masa transisi sampai terpilih dan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota pada 2025 nanti. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024.

Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sekaligus penetapan visi dan misi Kepala Daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Pada butir Kesatu huruf c di instruksikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah harus menyiapkan RPJM Daerah, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Provinsi yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang akan berperan sebagai pendorong yang berperan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2025-2025;
c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
d. RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026;
e. Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan;
f. Kebijakan nasional; dan
g. Regulasi yang berlaku.

Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah**.**

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan Perencanaan menyusun Renstra Tahun 2024-2026.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Proses penyusunan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penetapan Renstra

Sektetariat Daerah Kota sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Padang Panjang tentunya harus berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan daerah yang akan dirumuskan menjadi Renstra Perangkat Daerah yang akan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang akan menjadi pedoman bagi perencanaan strategis dalam 3 tahun periode 2024-2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemenrintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;

33. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 adalah agar tersedianya suatu dokumen rencana strategis yang sistematis, terarah, terpadu, komprehensif yang memungkinkan adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Sedangkan Tujuan dari Renstra ini antara lain adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Secara terinci tujuan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk kurun 3 (tiga) tahun kedepan;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan untuk tercapainya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Menyajikan tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24).
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
2.5. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan
3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Menyajikan Tabel T-C.25)
4.2 Cascading

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menyajikan Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menyajikan Tabel T-C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
Menyajikan Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 72 Tahun 2020 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Sekretaris Daerah**
2. **Staf Ahli.**
   a. **Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;**

      Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

   b. **Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;**

      Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota

   c. **Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;**

      Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

3. **Asisten.**
   a. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

      Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, serta pengkoordinasian urusan yang meliputi :

      a. pendidikan;
      b. kebudayaan;
      c. kesehatan;
      d. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
      e. sosial;
      f. pemberdayaan sosial dan perlindungan anak;
      g. pemberdayaan masyarakat desa;
      h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. tenaga kerja;
j. transmigrasi;
k. kependudukan dan pencatatan sipil;
l. kepemudaan dan olahraga;
m. kesatuan bangsa dan politik; dan
n. penanggulangan bencana daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

**a.1 Bagian Pemerintahan ;**

Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
3) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

**a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat;**

Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

**a.3 Bagian Hukum;**

Bagian Hukum dikepalai oleh Kepala Bagian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum terdiri dari :

1) Sub Bagian Perundang-undangan;
2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; dan
3) Sub Bagian Bantuan Hukum.

**b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pengoordinasian urusan yang meliputi :

a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. pertanahan;
c. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d. lingkungan hidup;
e. penanaman modal;
f. pangan;
g. kelautan dan perikanan;
h. pertanian;
i. kehutanan;
j. perhubungan;
k. koperasi, usaha mikro kecil menengah;
l. energi dan sumber daya mineral dan perindustrian;
m. perdagangan;
n. pariwisata; dan
o. perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

**b.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dikepalai oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian terdiri dari:

1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
2) Sub Bagian Perekonomian; dan
3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.

**b.2 Bagian Pengadaan Barang Jasa;**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dikepalai oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaandan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari**:**

1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

**b.3 Bagian Administrasi Pembangunan;**

Bagian Administrasi Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
2) Sub Bagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

**c. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta pengkoordinasian urusan yang meliputi :

a. pelayanan terpadu satu pintu;
b. komunikasidan informatika;
c. statistik;
d. persandian;
e. perpustakaan;
f. kearsipan;
g. pengelolaan keuangan;
h. kepegawaian;
i. pendidikan dan pelatihan; dan
j. pengawasan.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

**c.1 Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi dikepalai oleh Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

1) Sub Bagian Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Lakasana; dan
3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrai.

### c.2 Bagian Umum

Bagian Umum dikepalai oleh Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari:

1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

### c.3 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dikepalai oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Dokumentasi terdiri dari:

1) Sub Bagian Protokol; dan
2) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

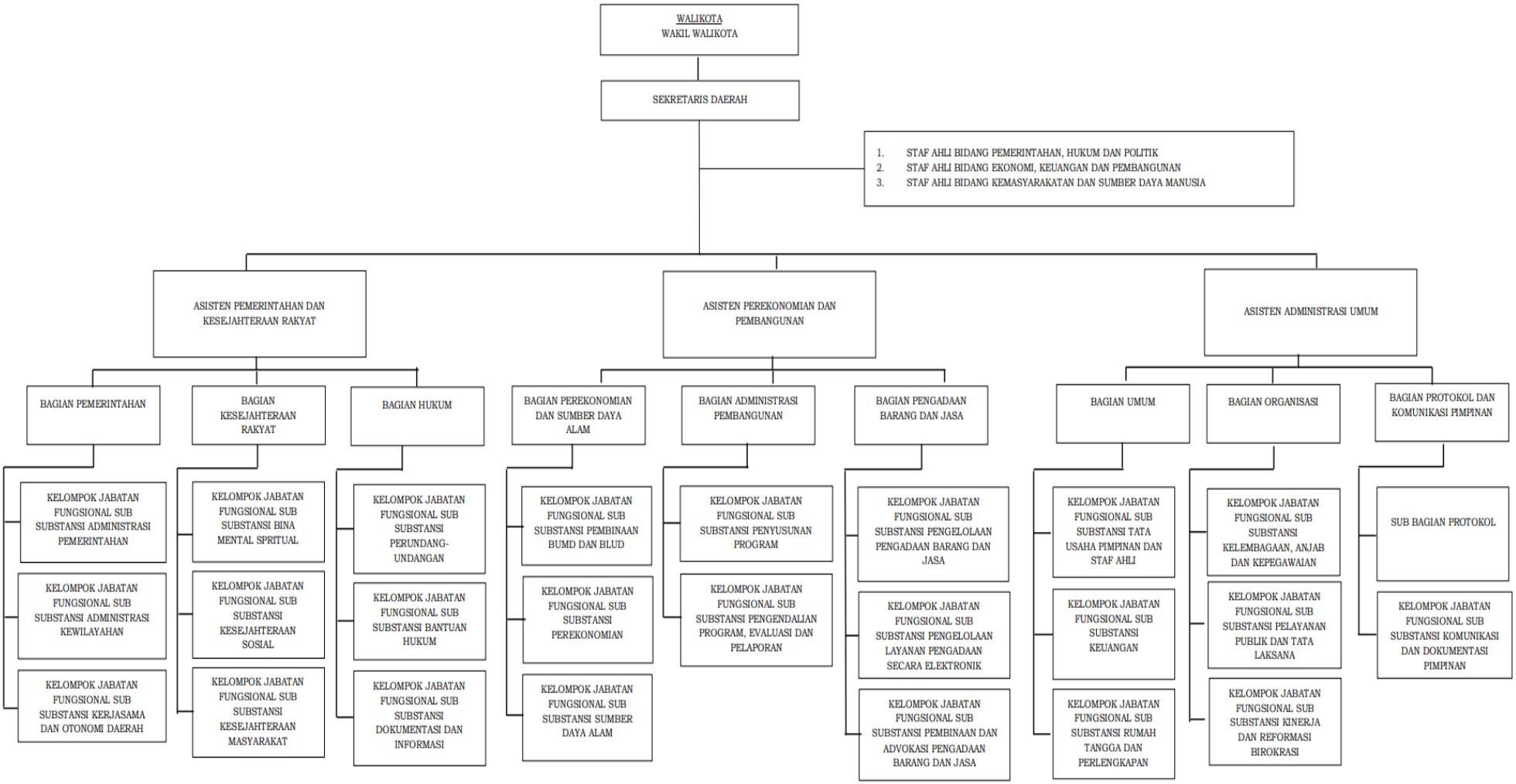

## 2.2. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

**Tabel. 2.1.**
**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**
**Menurut Golongan Tahun 2022**

| No | Uraian Unit Kerja | Golongan | | | | | | | | | | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | | II | | III | | IV | | Non | | |
| | **Jenis kelamin** | **Lk** | **Pr** | **Lk** | **Pr** | **Lk** | **Pr** | **Lk** | **Pr** | **Lk** | **Pr** | |
| 1 | Sekretaris Daerah | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | Staf Ahli | - | - | - | | - | | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 3 | Staf pada Staf Ahli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Asisten | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 5 | Bagian Pemerintahan | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 9 |
| 6 | Bagian Hukum | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Bagian Organisasi | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | 10 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | - | - | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | 12 | 4 | 27 |
| 9 | Bagian Perekonomian | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 7 |
| 10 | Bagian Pengadaan Barang Jasa | - | - | 2 | 1 | 10 | 6 | - | - | 1 | 1 | 21 |
| 11 | Bagian Umum | 1 | - | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | - | 33 | 28 | 90 |
| 12 | Bagian Administrasi Pembangunan | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 13 | Bagian Protokoler | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 12 |
| | **Jumlah** | **1** | **0** | **16** | **9** | **36** | **33** | **12** | **3** | **52** | **37** | **199** |

*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2022*

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut golongan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

**Gambar 2.2.**

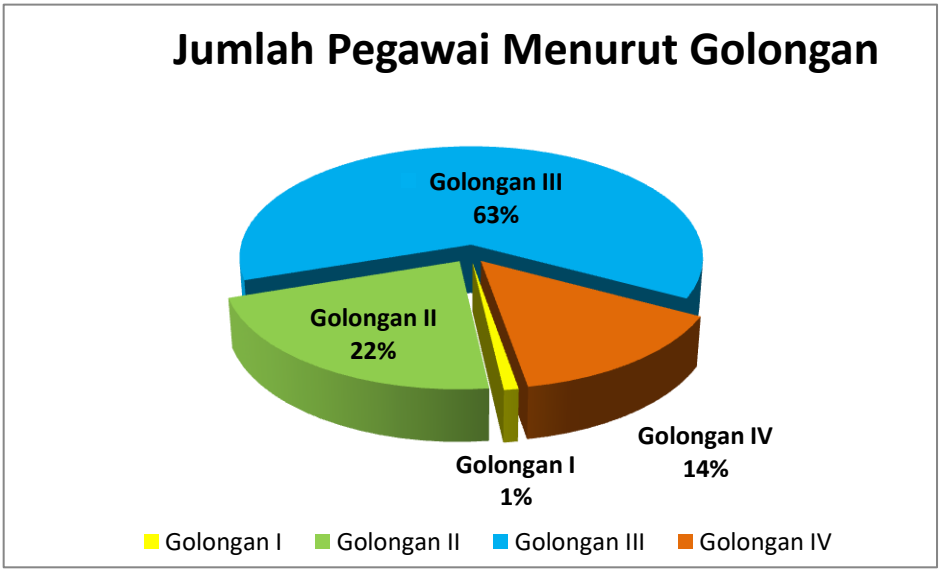


*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2022, diolah.*

Selanjutnya bila dilihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Menurut Latar Belakang Pendidikan Umum Tahun 2022**

| No | Uraian Unit Kerja | Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SLTP | SLTA | DIII | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | Sekretaris Daerah | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Staf Ahli | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 3 | Staf pada Staf Ahli | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Asisten | - | - | - | - | 1 | 2 | | 3 |
| 5 | Bagian Pemerintahan | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 8 |
| 6 | Bagian Hukum | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 8 |
| 7 | Bagian Organisasi | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 9 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 11 |
| 9 | Bagian Perekonomian | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 7 |
| 10 | Bagian Pengadaan Barang Jasa | - | - | 1 | 3 | 13 | 2 | - | 19 |
| 11 | Bagian Umum | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1 | - | 29 |
| 12 | Bagian Administrasi Pembangunan | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
| 13 | Bagian Protokoler | - | - | - | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | **Jumlah** | **1** | **2** | **18** | **10** | **57** | **22** | **0** | **110** |

*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang, 2022*

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut latar belakang pendidikan

umum tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.2. di bawah ini :

**Gambar 2.3.**

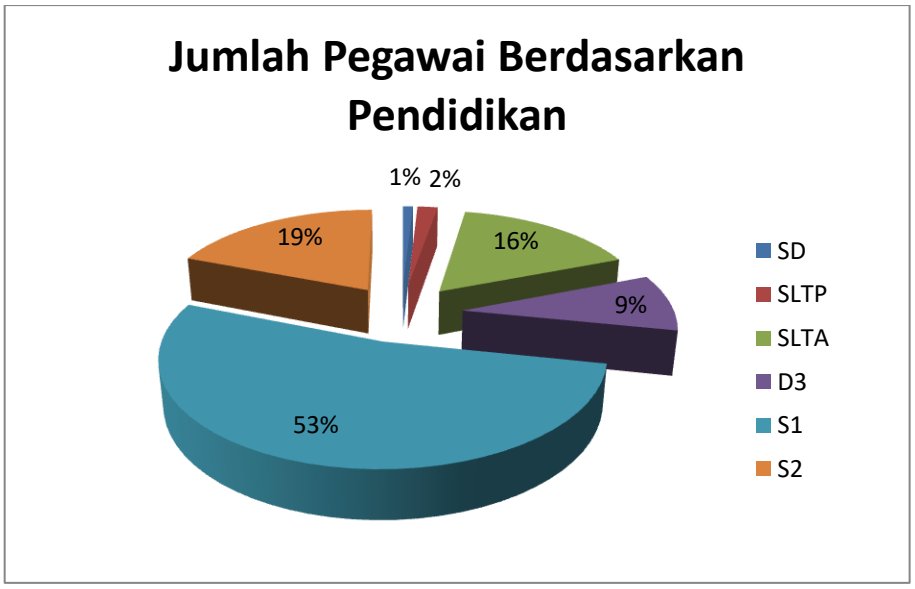


*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2022, data diolah.*

Adapun gambaran umum ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah**

**Kota Padang Panjang Tahun 2022**

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Transportable Generating Set | 1 | 1 | | |
| 2 | Stationary Generating Set | 1 | 1 | | |
| 3 | Pompa Air | 3 | 3 | | |
| 4 | Sedan | 4 | 4 | | |
| 5 | Jeep | 2 | 2 | | |
| 6 | Station Wagon | 23 | 23 | | |
| 7 | Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) | 2 | 2 | | |
| 8 | Truck + Attachment | 1 | 1 | | |
| 9 | Pick Up | 1 | 1 | | |
| 10 | Sepeda Motor | 50 | 50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mesin Las Listrik | 1 | 1 | | |
| 12 | Mesin Gerinda Tangan | 1 | 1 | | |
| 13 | Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu) | 1 | 1 | | |
| 14 | Mesin Bor Kayu | 1 | 1 | | |
| 15 | Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst) | 2 | 2 | | |
| 16 | Mesin Ketik Listrik | 1 | 1 | | |
| 17 | Mesin Hitung Manual | 5 | 5 | | |
| 18 | Lemari Besi/Metal | 19 | 19 | | |
| 19 | Lemari Kayu | 26 | 26 | | |
| 20 | Rak Besi | 4 | 4 | | |
| 21 | Rak Kayu | 2 | 2 | | |
| 22 | Filing Cabinet Besi | 25 | 25 | | |
| 23 | Brandkas | 2 | 2 | | |
| 24 | Compact Rolling | 1 | 1 | | |
| 25 | Lemari Kaca | 7 | 7 | | |
| 26 | Lemari Makan | 2 | 2 | | |
| 27 | CCTV - Camera Control Television System | 5 | 5 | | |
| 28 | Alat Penghancur Kertas | 4 | 4 | | |
| 29 | Mesin Absensi | 9 | 9 | | |
| 30 | Papan Nama Instansi | 1 | 1 | | |
| 31 | Papan Pengumuman | 2 | 2 | | |
| 32 | Papan Tulis | 1 | 1 | | |
| 33 | Alat Kantor Lainnya | 86 | 86 | | |
| 34 | Meja Kerja Kayu | 22 | 22 | | |
| 35 | Kursi Besi/Metal | 1 | 1 | | |
| 36 | Kursi Kayu | 1 | 1 | | |
| 37 | Meja Rapat | 22 | 22 | | |
| 38 | Tempat Tidur Kayu | 13 | 13 | | |
| 39 | Meja Panjang | 5 | 5 | | |
| 40 | Meja Bundar | 4 | 4 | | |
| 41 | Meja 1/2 Biro | 93 | 93 | | |
| 42 | Kasur/Spring Bed | 17 | 17 | | |
| 43 | Meja Makan Besi | 34 | 34 | | |
| 44 | Kursi Rapat | 95 | 95 | | |
| 45 | Kursi Tamu | 9 | 9 | | |
| 46 | Kursi Putar | 26 | 26 | | |
| 47 | Kursi Biasa | 11 | 11 | | |
| 48 | Meja Komputer | 11 | 11 | | |
| 49 | Sofa | 32 | 32 | | |
| 50 | Meubeleur lainnya | 24 | 24 | | |
| 51 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 12 | 12 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mesin Cuci | 7 | 7 | | |
| 53 | Air Cleaner | 1 | 1 | | |
| 54 | Lemari Es | 12 | 12 | | |
| 55 | A.C. Sentral | 1 | 1 | | |
| 56 | A.C. Window | 20 | 20 | | |
| 57 | A.C. Split | 5 | 5 | | |
| 58 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 7 | 7 | | |
| 59 | Kipas Angin | 9 | 9 | | |
| 60 | Kompor Listrik (Alat Dapur) | 2 | 2 | | |
| 61 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | 1 | | |
| 62 | Oven Listrik | 1 | 1 | | |
| 63 | Kitchen Set | 10 | 10 | | |
| 64 | Alat Dapur lainnya | 121 | 121 | | |
| 65 | Televisi | 25 | 25 | | |
| 66 | Loudspeaker | 4 | 4 | | |
| 67 | Wireless | 3 | 3 | | |
| 68 | Microphone | 8 | 8 | | |
| 69 | Mic Conference | 1 | 1 | | |
| 70 | Unit Power Supply | 1 | 1 | | |
| 71 | Camera Video | 8 | 8 | | |
| 72 | Tiang Bendera | 42 | 42 | | |
| 73 | Seterika | 1 | 1 | | |
| 74 | Tangga Aluminium | 1 | 1 | | |
| 75 | Kaca Hias | 11 | 11 | | |
| 76 | Mimbar/Podium | 1 | 1 | | |
| 77 | Karpet | 632 | 632 | | |
| 78 | Gordyin/Kray | 447 | 447 | | |
| 79 | Alat Pemanas Ruangan | 9 | 9 | | |
| 80 | Lampu | 3 | 3 | | |
| 81 | Home Theater | 4 | 4 | | |
| 82 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 52 | 52 | | |
| 83 | Alat Pemadam/Portable | 1 | 1 | | |
| 84 | Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2 | 2 | | |
| 85 | Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota | 1 | 1 | | |
| 86 | Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 1 | 1 | | |
| 88 | Meja Tamu Biasa | 9 | 9 | | |
| 89 | Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 4 | 4 | | |
| 90 | Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota | 1 | 1 | | |
| 91 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 3 | 3 | | |
| 92 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf | 200 | 200 | | |
| 93 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 21 | 21 | | |
| 94 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota | 2 | 2 | | |
| 95 | Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota | 1 | 1 | | |
| 96 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 3 | 3 | | |
| 97 | Audio Visual | 1 | 1 | | |
| 98 | Modulation Monitor Speaker Kabaret | 1 | 1 | | |
| 99 | Microphone/Wireless MIC | 15 | 15 | | |
| 100 | Microphone/Boom Stand | 6 | 6 | | |
| 101 | Microphone Connector Box | 1 | 1 | | |
| 102 | Power Amplifier | 6 | 6 | | |
| 103 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 70 | 70 | | |
| 104 | Camera Electronic | 2 | 2 | | |
| 105 | Video Mixer | 1 | 1 | | |
| 106 | Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) | 1 | 1 | | |
| 107 | Tripod Camera | 2 | 2 | | |
| 108 | Lighting Stand Tripod | 4 | 4 | | |
| 109 | Mixer PVC | 3 | 3 | | |
| 110 | Layar Film/Projector | 37 | 37 | | |
| 111 | Alat Studio Video Lainnya | 3 | 3 | | |
| 112 | Handy Talky (HT) | 15 | 15 | | |
| 113 | Facsimile | 2 | 2 | | |
| 114 | alat komunikasi sosial lainnya (dst) | 38 | 38 | | |
| 115 | Alat Ukur | 1 | 1 | | |
| 116 | alat laboratorium lain lainnya (dst) | 1 | 1 | | |
| 117 | Alat Khusus Keamanan Lainnya | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) | 2 | 2 | | |
| 119 | Local Area Network (LAN) | 1 | 1 | | |
| 120 | Internet | 3 | 3 | | |
| 121 | P.C Unit | 82 | 82 | | |
| 122 | Lap Top | 46 | 46 | | |
| 123 | Note Book | 19 | 19 | | |
| 124 | Personal Komputer lainnya | 8 | 8 | | |
| 125 | Hard Disk | 5 | 5 | | |
| 126 | peralatan mainframe lainnya (dst) | 18 | 18 | | |
| 127 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 70 | 70 | | |
| 128 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 11 | 11 | | |
| 129 | External/ Portable Hardisk | 2 | 2 | | |
| 130 | Server | 3 | 3 | | |
| 131 | Router | 1 | 1 | | |
| 132 | Hub | 1 | 1 | | |
| 133 | Rak Server | 1 | 1 | | |
| 134 | Acces Point | 10 | 10 | | |
| 135 | Tenda | 1 | 1 | | |
| 136 | Sepeda Olah Raga | 2 | 2 | | |
| 137 | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 8 | 8 | | |
| 138 | Station Wagon | 3 | | | 3 |
| 139 | Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) | 1 | | | 1 |
| 140 | Sepeda Motor | 3 | | | 3 |
| 141 | Lemari Kayu | 8 | | | 8 |
| 142 | Filing Cabinet Besi | 15 | | | 15 |
| 143 | Papan Pengumuman | 8 | | | 8 |
| 144 | Alat Kantor Lainnya | 52 | | | 52 |
| 145 | Kursi Kayu | 2 | | | 2 |
| 146 | Meja Rapat | 7 | | | 7 |
| 147 | Tempat Tidur Kayu | 4 | | | 4 |
| 148 | Meja Bundar | 6 | | | 6 |
| 149 | Meja 1/2 Biro | 9 | | | 9 |
| 150 | Kasur/Spring Bed | 1 | | | 1 |
| 151 | Meja Makan Besi | 50 | | | 50 |
| 152 | Kursi Tamu | 8 | | | 8 |
| 153 | Kursi Putar | 3 | | | 3 |
| 154 | Kursi Biasa | 2 | | | 2 |
| 155 | Meja Komputer | 2 | | | 2 |
| 156 | Meubeleur lainnya | 1 | | | 1 |
| 157 | Jam Elektronik | 1 | | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 2 | | | 2 |
| 159 | Mesin Cuci | 4 | | | 4 |
| 160 | Lemari Es | 2 | | | 2 |
| 161 | Kipas Angin | 2 | | | 2 |
| 162 | Kompor Listrik (Alat Dapur) | 1 | | | 1 |
| 163 | Oven Listrik | 2 | | | 2 |
| 164 | Tabung Gas | 5 | | | 5 |
| 165 | Alat Dapur lainnya | 89 | | | 89 |
| 166 | Radio | 11 | | | 11 |
| 167 | Televisi | 6 | | | 6 |
| 168 | Amplifier | 2 | | | 2 |
| 169 | Loudspeaker | 2 | | | 2 |
| 170 | Sound System | 10 | | | 10 |
| 171 | Wireless | 6 | | | 6 |
| 172 | Microphone | 38 | | | 38 |
| 173 | Camera Video | 20 | | | 20 |
| 174 | Alat Hiasan | 6 | | | 6 |
| 175 | Tangga Aluminium | 1 | | | 1 |
| 176 | Mimbar/Podium | 2 | | | 2 |
| 177 | Handy Cam | 5 | | | 5 |
| 178 | Alat Pemanas Ruangan | 1 | | | 1 |
| 179 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 52 | | | 52 |
| 180 | Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2 | | | 2 |
| 181 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | | | 1 |
| 182 | Meja Tamu Biasa | 4 | | | 4 |
| 183 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 | | | 2 |
| 184 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 35 | | | 35 |
| 185 | Tripod Camera | 1 | | | 1 |
| 186 | Lensa Kamera | 2 | | | 2 |
| 187 | Mixer PVC | 2 | | | 2 |
| 188 | Layar Film/Projector | 10 | | | 10 |
| 189 | Pesawat Telephone | 1 | | | 1 |
| 190 | Handy Talky (HT) | 11 | | | 11 |
| 191 | Facsimile | 2 | | | 2 |
| 192 | alat komunikasi sosial lainnya (dst) | 17 | | | 17 |
| 193 | Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) | 1 | | | 1 |
| 194 | P.C Unit | 17 | | | 17 |
| 195 | Lap Top | 7 | | | 7 |
| 196 | Note Book | 17 | | | 17 |
| 197 | peralatan mainframe lainnya (dst) | 10 | | | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 29 | | | 29 |
| 199 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 6 | | | 6 |
| 200 | External | 1 | | | 1 |
| 201 | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 1 | | | 1 |

*Sumber : Bagian Umum Setdako Padang Panjang, 2021*

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja pelayanan, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Jika ditinjau dari segi urusan, Sekretariat Daerah menyelenggarakan beberapa urusan, antara lain : urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian dan urusan pertanahan. Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat daerah dan realisasi Keuangan Dapat dilihat pada Tabel T-C.2.3 dan T-C.2.4 berikut:

Tabel 2.4.

**Tabel T-C.23.**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah**
**Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target NSPK | Target IKK | Target Indikato | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | | | | B | B | B | B | BB | B | B | B | B | | | | | | |
| | Nilai Sakip | | | | 60,10 | 65,00 | 61,20 | 66,30 | 70,10 | 60,64 | 60,80 | 61,95 | | | 100,90 | 93,54 | 101,23 | | |
| 2 | Indek Kepuasan Masyarakat | | | | 78 (baik) | 79 (baik) | 89,87 (Sangat | 89,52 (Sangat | 90,02 (Sangat | 85,68 | 88,62 | 96,13 | 95,33 | | 109,85 | 112,18 | 106,97 | 105,90 | |
| 3 | Nilai LPPD | | | | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi (3,15) | Sangat Tinggi (3,17) | | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid | | | | 38,82 | 56,58 | 74,34 | 90,79 | 100 | 46,04 | 52,62 | 67,05 | 76,11 | | 118,60 | 93,00 | 90,19 | 83,83 | |
| 5 | Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM | | | | - | - | - | 82,9 | 82,95 | | | | | | | | | | |
| 6 | Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan | | | | - | - | - | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | |
| 7 | Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat | | | | - | - | - | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | |
| 8 | Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan | | | | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 97,26 | 98,67 | 97,62 | 98,06 | | 138,94 | 131,56 | 122,03 | 108,96 | |
| 9 | Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Panjang | | | | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 70 | 75 | 80 | 90 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi | | | | - | - | - | 90 | 90 | | | | 90 | | | | | 100 | |
| 11 | Persentase peringkat kafilah MTQ Tingkat Provinsi | | | | 9 | | 8 | | 7 | 13 | | 7 | | | | | | | |
| 12 | Jumlah pendataan kelembagaan | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah dokumen tata laksana | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Nilai rata-rata kualitas pelayanan publik | ` | | | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,45 | 3,9 | 3,93 | 4,35 | | 106,15 | 118,18 | 117,31 | 127,94 | |
| 15 | Jumlah batas antar wilayah yang terselesaikan | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintahan daerah yang dapat diselesaikan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS Tingkat Provinsi | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah | | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Tabel T-C.24.**
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah**
**Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023**

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **AWAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Belanja Daerah** | **30.746.871.185** | **18.867.025.787** | **55.105.027.200** | **45.459.570.550** | **47.517.678.251** | **26.795.015.267** | **17.046.141.599** | **47.156.437.251** | **42.474.900.159** | | **87,15** | **90,35** | **85,58** | **93,43** | | **39.539.234.595** | **33.368.123.569** |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **7.749.711.333** | | - | - | - | **7.240.144.196** | | | | | **93,42** | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 27.000.000 | | | | | 26.289.000 | | | | | 97,37 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 381.600.000 | | | | | 272.885.834 | | | | | 71,51 | | | | | | |
| Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 1.852.432.000 | | - | | | 1.732.847.577 | | | | | 93,54 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 363.675.000 | | | | | 331.138.930 | | | | | 91,05 | | | | | | |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 70.000.000 | | | | | 69.968.860 | | | | | 99,96 | | | | | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | 120.000.000 | | | | | 41.605.425 | | | | | 34,67 | | | | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.000.000 | | | | | 49.990.750 | | | | | 99,98 | | | | | | |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 662.309.333 | | | | | 634.734.040 | | | | | 95,84 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran | 325.115.000 | | | | | 305.637.618 | | | | | 94,01 | | | | | | |
| Rapat2 Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah | 3.259.200.000 | | | | | 3.245.907.297 | | | | | 99,59 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 598.380.000 | | | | | 492.368.750 | | | | | 82,28 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor | 40.000.000 | | | | | 36.770.115 | | | | | 91,93 | | | | | | |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **8.060.580.000** | | | | | **6.959.080.168** | | | | | **86,33** | | | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 644.200.000 | | | | | 233.605.350 | | | | | 36,26 | | | | | | |
| Pengadaan Mobil Jabatan | 856.300.000 | | | | | 701.325.375 | | | | | 81,90 | | | | | | |
| Pemel.Rutin/Berkala Gedung kantor | 200.000.000 | | | | | 180.837.500 | | | | | 90,42 | | | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 1.017.630.000 | | | | | 880.526.538 | | | | | 86,53 | | | | | | |
| Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas | 150.000.000 | | | | | 94.465.400 | | | | | 62,98 | | | | | | |
| Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan | 348.000.000 | | | | | 301.457.500 | | | | | 86,63 | | | | | | |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah Jabatan/Dinas | 100.000.000 | | | | | 41.671.000 | | | | | 41,67 | | | | | | |
| Pemel.Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor | 124.500.000 | | | | | 78.608.264 | | | | | 63,14 | | | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 2.765.950.000 | | | | | 2.732.439.115 | | | | | 98,79 | | | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | 1.854.000.000 | | | | | 1.714.144.126 | | | | | 92,46 | | | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur** | **120.000.000** | | | | | **53.441.200** | | | | | **44,53** | | | | | | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 120.000.000 | | | | | 53.441.200 | | | | | 44,53 | | | | | | |
| **Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan** | **7.300.000** | | | | | **6.789.750** | | | | | **93,01** | | | | | | |
| Penilaian Kompetensi Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah | 7.300.000 | | | | | 6.789.750 | | | | | 93,01 | | | | | | |
| **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** | **4.863.846.402** | | | | | **3.345.737.540** | | | | | **68,79** | | | | | | |
| Operasional Rumah Jabatan KDH/WKDH | 2.807.110.402 | | | | | 2.555.083.705 | | | | | 91,02 | | | | | | |
| Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | 55.000.000 | | | | | 20.960.000 | | | | | 38,11 | | | | | | |
| Penunjang Operasional Pidato Wako Padang Panjang | 62.220.000 | | | | | 58.606.700 | | | | | 94,19 | | | | | | |
| Pelaksanaan Peringatan Hari Besar | 211.000.000 | | | | | 145.592.530 | | | | | 69,00 | | | | | | |
| Pelaksanaan Peringatan HUT Kota Padang Panjang ke-223 dan HUT RI | 98.320.000 | | | | | 81.545.750 | | | | | 82,94 | | | | | | |
| Optimalisasi Penyelenggaraan Keprotokolan | 389.676.000 | | | | | 335.188.280 | | | | | 86,02 | | | | | | |
| Pelaksanaan Kegiatan APEKSI 2017 | 100.000.000 | | | | | 95.902.700 | | | | | 95,90 | | | | | | |
| Pemberian Gelar Kehormatan | 64.450.000 | | | | | 52.857.875 | | | | | 82,01 | | | | | | |
| Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penunjang Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah | 64.450.000 | | | | | | | | | | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa** | **302.080.000** | | | | | **236.939.008** | | | | | **78,44** | | | | | | |
| Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | 302.080.000 | | | | | 236.939.008 | | | | | 78,44 | | | | | | |
| **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan** | **709.540.000** | | | | | **466.687.737** | | | | | **65,77** | | | | | | |
| Penyelesaian Masalah Hukum Pemda | 415.800.000 | | | | | 280.803.229 | | | | | 67,53 | | | | | | |
| Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah | 122.000.000 | | | | | 97.539.801 | | | | | 79,95 | | | | | | |
| Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah | 96.000.000 | | | | | 55.796.007 | | | | | 58,12 | | | | | | |
| Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat | 20.000.000 | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Masyarakat | 45.740.000 | | | | | 29.636.500 | | | | | 64,79 | | | | | | |
| Evaluasi dan Program Pelaporan Pelaksanaan RANHAM | 10.000.000 | | | | | 2.912.200 | | | | | 29,12 | | | | | | |
| **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** | **58.000.000** | | | | | **28.556.000** | | - | - | - | **95,19** | | | | | | |
| Penegasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang | 30.000.000 | | | | | 28.556.000 | | | | | 95,19 | | | | | | |
| Pemetaan Nama-nama Rupa Bumi Unsur Alami | 28.000.000 | | | | | 19.894.425 | | | | | 71,05 | | | | | | |
| **Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Kelaksanaan** | **112.925.000** | | | | | **72.961.453** | | | | | **64,61** | | | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 10.600.000 | | | | | 7.731.000 | | | | | 72,93 | | | | | | |
| Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan | 39.600.000 | | | | | 21.331.473 | | | | | 53,87 | | | | | | |
| Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural | 18.350.000 | | | | | 16.281.750 | | | | | 88,73 | | | | | | |
| Pembinaan SOP | 14.375.000 | | | | | 5.146.775 | | | | | 35,80 | | | | | | |
| Evaluasi pelaksanaan SOTK | 30.000.000 | | | | | 22.470.455 | | | | | 74,90 | | | | | | |
| **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** | **458.730.000** | | | | | **391.027.333** | | | | | **85,24** | | | | | | |
| Pelaksanaan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) | 10.080.000 | | | | | 1.536.000 | | | | | 15,24 | | | | | | |
| Pembinaan Pelayanan Publik | 50.000.000 | | | | | 17.641.333 | | | | | 35,28 | | | | | | |
| Monitoring Pelayanan Putlik | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Survey Kepuasan Masyarakat | 328.650.000 | | | | | 302.275.000 | | | | | 91,97 | | | | | | |
| Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001 | 70.000.000 | | | | | 69.575.000 | | | | | 99,39 | | | | | | |
| **Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah** | **195.000.000** | | | | | **150.430.968** | | | | | **77,14** | | | | | | |
| Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah | 50.000.000 | | | | | 38.690.628 | | | | | 77,38 | | | | | | |
| Koordinasi kebijakan urusan pertanian industri rumah tangga dan industri kecil menengah | 25.000.000 | | | | | 12.501.600 | | | | | 50,01 | | | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang | 35.000.000 | | | | | 28.548.000 | | | | | 81,57 | | | | | | |
| Koordinasi kebijakan bidang sarana dan kelembagaan ekonomi daerah | 50.000.000 | | | | | 42.058.340 | | | | | 84,12 | | | | | | |
| Koordinasi kebijakan umum lingkungan dan penanaman modal | 35.000.000 | | | | | 28.632.400 | | | | | 81,81 | | | | | | |
| **Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** | **312.610.000** | | | | | **120.894.500** | | | | | **38,67** | | | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan | 19.610.000 | | | | | 5.311.900 | | | | | 27,09 | | | | | | |
| Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Operasional Maintenance LPSE | 123.000.000 | | | | | 115.582.600 | | | | | 93,97 | | | | | | |
| Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | - | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis Lapangan | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Bimbingan Teknis Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa | 170.000.000 | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| **Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** | **227.596.250** | | | | | **130.902.214** | | | | | **57,52** | | | | | | |
| Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang | 86.756.250 | | | | | 26.587.166 | | | | | 30,65 | | | | | | |
| Evaluasi Kinerja SKPD Kota Padang Panjang | 27.450.000 | | | | | 16.705.000 | | | | | 60,86 | | | | | | |
| Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang | 16.320.000 | | | | | 9.894.950 | | | | | 60,63 | | | | | | |
| Penyusunan Buku LKPJ Wako | 24.000.000 | | | | | 23.400.100 | | | | | 97,50 | | | | | | |
| Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 55.000.000 | | | | | 49.219.248 | | | | | 89,49 | | | | | | |
| Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan | 18.070.000 | | | | | 5.095.750 | | | | | 28,20 | | | | | | |
| **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **8.580.572.200** | | | | | **7.571.528.775** | | | | | **88,24** | | | | | | |
| Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) | 132.362.200 | | | | | 82.992.050 | | | | | 62,70 | | | | | | |
| Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang | 109.175.000 | | | | | 69.563.825 | | | | | 63,72 | | | | | | |
| Fasilitas Peringatan Hari-Hari Besar Islam | 157.100.000 | | | | | 128.028.500 | | | | | 81,49 | | | | | | |
| Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ | 123.625.000 | | | | | 101.443.850 | | | | | 82,06 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penunjang Tim Ramadhan | 83.935.000 | | | | | 70.190.000 | | | | | 83,62 | | | | | | |
| Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ,Imam Mesjid/Mushalla dan Pengurus Baznas Kota Padang Panjang | 4.822.075.000 | | | | | 4.631.226.900 | | | | | 96,04 | | | | | | |
| Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji Kota Padang Panjang | 100.775.000 | | | | | 85.565.750 | | | | | 84,91 | | | | | | |
| Persiapan TC dan pelaksanaan mengikuti MTQ Prov. Sumbar | 1.817.920.000 | | | | | 1.530.324.050 | | | | | 84,18 | | | | | | |
| Pembinaan Remaja Masjid Kota Padang Panjang | 214.100.000 | | | | | 125.926.000 | | | | | 58,82 | | | | | | |
| Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majlis Taklim Bulanan Kelurahan Se Kota Padang Panjang | 68.150.000 | | | | | 56.890.825 | | | | | 83,48 | | | | | | |
| Fasilitasi Kegiatan Islamic Center | 476.425.000 | | | | | 377.621.300 | | | | | 79,26 | | | | | | |
| Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran | 110.780.000 | | | | | 64.353.625 | | | | | 58,09 | | | | | | |
| Subuh Mubarakah | 64.150.000 | | | | | 55.530.225 | | | | | 86,56 | | | | | | |
| Peringatan Hari Santri | 300.000.000 | | | | | 191.871.875 | | | | | 63,96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **4.771.675.080** | | | | | **4.576.635.739** | | | | | **95,91** | | | | | | |
| **Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional** | | **1.610.703.600** | | | | | **1.530.766.177** | | | | | **95,04** | | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | 550.500.000 | | | | | 550.415.050 | | | | | 99,98 | | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | 613.300.000 | | | | | 608.375.550 | | | | | 99,20 | | | | | | |
| Belanja Premi Asuransi Kesehatan | | 9.953.600 | | | | | 2.122.489 | | | | | 21,32 | | | | | | |
| Belanja Service Kendaraan | | 350.000.000 | | | | | 318.869.338 | | | | | 91,11 | | | | | | |
| Belanja Jasa KIR | | 1.500.000 | | | | | 195.000 | | | | | 13,00 | | | | | | |
| Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | | 85.450.000 | | | | | 50.788.750 | | | | | 59,44 | | | | | | |
| **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor** | | **316.733.000** | | | | | **291.497.124** | | | | | **92,03** | | | | | | |
| Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | | 55.000.000 | | | | | 54.962.070 | | | | | 99,93 | | | | | | |
| Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran | | 3.000.000 | | | | | 1.280.000 | | | | | 42,67 | | | | | | |
| Belanja pengisian tabung gas | | 2.000.000 | | | | | 1.005.000 | | | | | 50,25 | | | | | | |
| Belanja Jasa Non Pegawai | | 16.500.000 | | | | | 7.087.660 | | | | | 42,96 | | | | | | |
| Belanja retribusi kebersihan | | 2.400.000 | | | | | 2.150.000 | | | | | 89,58 | | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | 233.500.000 | | | | | 224.060.000 | | | | | 95,96 | | | | | | |
| Belanja Premi Asuransi Kesehatan | | 4.333.000 | | | | | 952.394 | | | | | 21,98 | | | | | | |
| **Penyediaan Makanan dan Minuman** | | **620.850.000** | | | | | **575.083.053** | | | | | **92,63** | | | | | | |
| Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Belanja Alat dan Perlengkapan Dapur Habis Pakai | | 10.000.000 | | | | | 7.113.538 | | | | | 71,14 | | | | | | |
| Belanja Makan Minum Harian Pegawai | | 18.000.000 | | | | | 9.870.000 | | | | | 54,83 | | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 40.375.000 | | | | | 35.818.175 | | | | | 88,71 | | | | | | |
| Belanja Makan Minum Tamu | | 552.475.000 | | | | | 522.281.340 | | | | | 94,53 | | | | | | |
| **Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah** | | **1.387.880.428** | | | | | **1.386.922.415** | | | | | **99,93** | | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 336.211.000 | | | | | 336.157.050 | | | | | 99,98 | | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 1.051.669.428 | | | | | 1.050.765.365 | | | | | 99,91 | | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar negeri | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| **Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor** | | **312.884.652** | | | | | **294.947.864** | | | | | **94,27** | | | | | | |
| Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | | 83.830.800 | | | | | 82.475.400 | | | | | 98,38 | | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | 229.053.852 | | | | | 212.472.464 | | | | | 92,76 | | | | | | |
| Belanja Premi Asuransi Kesehatan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| **Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat** | | **121.530.000** | | | | | **111.208.155** | | | | | **91,51** | | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 60.000.000 | | | | | 58.728.005 | | | | | 97,88 | | | | | | |
| Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | | 19.800.000 | | | | | 18.000.000 | | | | | 90,91 | | | | | | |
| Belanja paket/pengiriman | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Belanja cetak | | 28.330.000 | | | | | 24.182.200 | | | | | 85,36 | | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 13.400.000 | | | | | 10.297.950 | | | | | 76,85 | | | | | | |
| **Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi** | | **401.093.400** | | | | | **386.210.951** | | | | | **96,29** | | | | | | |
| Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | | 75.000.000 | | | | | 74.969.300 | | | | | 99,96 | | | | | | |
| Belanja telepon | | 78.000.000 | | | | | 76.122.283 | | | | | 97,59 | | | | | | |
| Belanja air | | 110.000.000 | | | | | 106.672.700 | | | | | 96,98 | | | | | | |
| Belanja listrik | | 134.093.400 | | | | | 124.546.668 | | | | | 92,88 | | | | | | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | | 4.000.000 | | | | | 3.900.000 | | | | | 97,50 | | | | | | |
| **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | **2.966.177.400** | | | | | **2.621.999.626** | | | | | **88,40** | | | | | | |
| **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor** | | **677.950.000** | | | | | **623.684.500** | | | | | **92,00** | | | | | | |
| Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan Tukang Besi | | 3.450.000 | | | | | 3.423.000 | | | | | 99,22 | | | | | | |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | 142.350.000 | | | | | 114.389.700 | | | | | 80,36 | | | | | | |
| Belanja Modal Meubelair | | 194.450.000 | | | | | 175.215.800 | | | | | 90,11 | | | | | | |
| Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | | 51.850.000 | | | | | 47.971.000 | | | | | 92,52 | | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio | | 166.850.000 | | | | | 163.925.000 | | | | | 98,25 | | | | | | |
| Belanja Modal Personal Komputer | | 29.000.000 | | | | | 29.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan Personal Komputer | | 24.000.000 | | | | | 24.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan Jaringan | | 21.000.000 | | | | | 20.760.000 | | | | | 98,86 | | | | | | |
| Belanja Modal Lukisan Dan Ukiran | | 45.000.000 | | | | | 45.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas** | | **70.000.000** | | | | | **60.240.937** | | | | | **86,06** | | | | | |
| Belanja bahan baku bangunan | | 40.000.000 | | | | | 38.133.109 | | | | | 95,33 | | | | | |
| Belanja Jasa Non Pegawai | | 30.000.000 | | | | | 22.107.828 | | | | | 73,69 | | | | | |
| **Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas** | | **733.400.000** | | | | | **642.750.255** | | | | | **87,64** | | | | | |
| Belanja Alat dan Perlengkapan Dapur Habis Pakai | | 15.000.000 | | | | | 14.941.090 | | | | | 99,61 | | | | | |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | 120.000.000 | | | | | 103.950.000 | | | | | 86,63 | | | | | |
| Belanja Modal Meubelair | | 308.000.000 | | | | | 298.156.727 | | | | | 96,80 | | | | | |
| Belanja Modal Alat Dapur | | 25.000.000 | | | | | 18.985.000 | | | | | 75,94 | | | | | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | 95.400.000 | | | | | 73.246.238 | | | | | 76,78 | | | | | |
| Belanja Modal Alat Studio Lainnya | | 55.000.000 | | | | | 19.471.200 | | | | | 35,40 | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan Personal Komputer | | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan Olah Raga Lainnya | | 100.000.000 | | | | | 99.000.000 | | | | | 99,00 | | | | | |
| **Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan** | | **290.770.000** | | | | | **258.185.530** | | | | | **88,79** | | | | | |
| Belanja Modal Rumah Negara Golongan II | | 290.770.000 | | | | | 258.185.530 | | | | | 88,79 | | | | | |
| **Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor** | | **914.057.400** | | | | | **801.571.408** | | | | | **87,69** | | | | | |
| Uang Lembur Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | 43.000.000 | | | | | 26.595.000 | | | | | 61,85 | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 145.825.000 | | | | | 139.510.600 | | | | | 95,67 | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | 257.550.000 | | | | | 243.672.544 | | | | | 94,61 | | | | | |
| Belanja Premi Asuransi Kesehatan | | 3.542.400 | | | | | 782.456 | | | | | 22,09 | | | | | |
| Belanja sewa meja kursi | | 20.000.000 | | | | | 8.177.500 | | | | | 40,89 | | | | | |
| Belanja sewa tenda | | 92.140.000 | | | | | 47.227.500 | | | | | 51,26 | | | | | |
| Belanja sewa pakaian adat/tradisional | | 1.600.000 | | | | | 1.600.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja sewa sound system dan lighting | | 10.000.000 | | | | | 4.000.000 | | | | | 40,00 | | | | | |
| Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin | | 85.000.000 | | | | | 82.995.945 | | | | | 97,64 | | | | | |
| Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan | | 255.400.000 | | | | | 247.009.863 | | | | | 96,71 | | | | | |
| **Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas** | | **280.000.000** | | | | | **235.566.996** | | | | | **84,13** | | | | | |
| Belanja bahan baku bangunan | | 135.000.000 | | | | | 134.646.721 | | | | | 99,74 | | | | | |
| Belanja Jasa Non Pegawai | | 75.000.000 | | | | | 51.031.015 | | | | | 68,04 | | | | | |
| Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin | | 70.000.000 | | | | | 49.889.260 | | | | | 71,27 | | | | | |
| **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** | | **2.421.695.960** | | | | | **2.283.848.646** | | | | | **94,31** | | | | | |
| **Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah** | | **30.000.000** | | | | | **17.528.800** | | | | | **58,43** | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 20.000.000 | | | | | 17.528.800 | | | | | 87,64 | | | | | |
| Belanja bahan baku bangunan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa meja kursi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa tenda | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa pakaian adat/tradisional | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa sound system dan lighting | | 10.000.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Makan Minum Tamu | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja pakaian khusus | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota** | | **2.391.695.960** | | | | | **2.266.319.846** | | | | | **94,76** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 5.000.000 | | | | | 4.959.500 | | | | | 99,19 | | | | | |
| Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | | 40.000.000 | | | | | 39.873.435 | | | | | 99,68 | | | | | |
| Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | | 152.000.000 | | | | | 145.082.472 | | | | | 95,45 | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | 33.300.000 | | | | | 18.180.000 | | | | | 54,59 | | | | | |
| Belanja pengisian tabung gas | | 18.000.000 | | | | | 17.865.000 | | | | | 99,25 | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 42.000.000 | | | | | 36.871.975 | | | | | 87,79 | | | | | |
| Belanja bibit tanaman | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja bibit ternak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja bahan obat-obatan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Pakan Ternak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Pupuk/Racun Hama | | 8.000.000 | | | | | 5.432.000 | | | | | 67,90 | | | | | |
| Belanja telepon | | 70.000.000 | | | | | 68.014.012 | | | | | 97,16 | | | | | |
| Belanja air | | 135.360.000 | | | | | 127.568.400 | | | | | 94,24 | | | | | |
| Belanja listrik | | 180.000.000 | | | | | 166.920.291 | | | | | 92,73 | | | | | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | | 4.000.000 | | | | | 3.840.000 | | | | | 96,00 | | | | | |
| Belanja Jasa Non Pegawai | | 40.000.000 | | | | | 36.187.293 | | | | | 90,47 | | | | | |
| Belanja retribusi kebersihan | | 1.800.000 | | | | | 1.600.000 | | | | | 88,89 | | | | | |
| Belanja Pajak Bumi dan Bangunan | | 8.465.000 | | | | | 6.882.620 | | | | | 81,31 | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | 611.470.960 | | | | | 568.798.744 | | | | | 93,02 | | | | | |
| Belanja Premi Asuransi Kesehatan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rumah Jabatan | | 648.000.000 | | | | | 647.376.209 | | | | | 99,90 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Tamu | | 166.300.000 | | | | | 148.502.655 | | | | | 89,30 | | | | | |
| Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH | | 140.000.000 | | | | | 139.398.568 | | | | | 99,57 | | | | | |
| Belanja pakaian kerja lapangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja pakaian batik tradisional | | 70.000.000 | | | | | 68.109.971 | | | | | 97,30 | | | | | |
| Belanja pakaian olahraga | | 18.000.000 | | | | | 14.856.701 | | | | | 82,54 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** | | **279.089.200** | | | | | **185.009.198** | | | | | **66,29** | | | | | |
| **Penyelesaian Masalah Hukum Pemda** | | **193.520.000** | | | | | **122.420.370** | | | | | **63,26** | | | | | |
| Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | 1.250.000 | | | | | 750.000 | | | | | 60,00 | | | | | |
| Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | | 120.000 | | | | | 120.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Jasa Pengacara | | 71.000.000 | | | | | 69.700.000 | | | | | 98,17 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 2.550.000 | | | | | 357.975 | | | | | 14,04 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 3.200.000 | | | | | 529.200 | | | | | 16,54 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 22.000.000 | | | | | 8.786.750 | | | | | 39,94 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 47.400.000 | | | | | 42.176.445 | | | | | 88,98 | | | | | |
| Belanja Jasa Konsultan Hukum | | 20.000.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 26.000.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| **Kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah** | | **51.700.000** | | | | | **39.599.950** | | | | | **76,60** | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan | | 7.200.000 | | | | | 6.000.000 | | | | | 83,33 | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 1.000.000 | | | | | 966.000 | | | | | 96,60 | | | | | |
| Belanja cetak | | 1.500.000 | | | | | 1.144.000 | | | | | 76,27 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 11.000.000 | | | | | 10.997.550 | | | | | 99,98 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 9.000.000 | | | | | 4.217.700 | | | | | 46,86 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 22.000.000 | | | | | 16.274.700 | | | | | 73,98 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah** | | **26.500.000** | | | | | **18.387.003** | | | | | **69,38** | | | | | |
| Belanja cetak | | 8.000.000 | | | | | 5.900.000 | | | | | 73,75 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 10.000.000 | | | | | 9.689.500 | | | | | 96,90 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 1.500.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 7.000.000 | | | | | 2.797.503 | | | | | 39,96 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM** | | **7.369.200** | | | | | **4.601.875** | | | | | **62,45** | | | | | |
| Belanja cetak | | 125.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 900.000 | | | | | 266.625 | | | | | 29,63 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 1.200.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 5.144.200 | | | | | 4.335.250 | | | | | 84,27 | | | | | |
| **Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** | | - | | | | | - | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** | | **21.199.900** | | | | | **18.124.250** | | | | | **85,49** | | | | | |
| **Kegiatan Penegasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang** | | **21.199.900** | | | | | **18.124.250** | | | | | **85,49** | | | | | |
| Belanja cetak | | 500.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 249.900 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 1.750.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 5.800.000 | | | | | 5.224.250 | | | | | 90,07 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 12.900.000 | | | | | 12.900.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan** | | **72.800.000** | | | | | **65.241.775** | | | | | **89,62** | | | | | |
| **Kegiatan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi** | | **39.200.000** | | | | | **34.276.975** | | | | | **87,44** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 7.500.000 | | | | | 6.827.629 | | | | | 91,04 | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 300.000 | | | | | 300.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | 2.700.000 | | | | | 2.700.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 5.100.000 | | | | | 4.851.000 | | | | | 95,12 | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | 1.000.000 | | | | | 990.000 | | | | | 99,00 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 10.300.000 | | | | | 8.517.000 | | | | | 82,69 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 12.300.000 | | | | | 10.091.346 | | | | | 82,04 | | | | | |
| **Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan** | | **33.600.000** | | | | | **30.964.800** | | | | | **92,16** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 1.940.000 | | | | | 1.620.000 | | | | | 83,51 | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 300.000 | | | | | 120.000 | | | | | 40,00 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 12.960.000 | | | | | 11.355.300 | | | | | 87,62 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 15.700.000 | | | | | 15.319.500 | | | | | 97,58 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 1.900.000 | | | | | 1.750.000 | | | | | 92,11 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 800.000 | | | | | 800.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Penyusunan Peta Proses Bisnis** | | - | | | | | - | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** | | **562.854.671** | | | | | **467.759.108** | | | | | **83,10** | | | | | |
| **Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan** | | **509.239.671** | | | | | **419.151.608** | | | | | **82,31** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 1.500.000 | | | | | 1.500.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | 210.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 300.000 | | | | | 280.500 | | | | | 93,50 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 16.000.000 | | | | | 3.447.150 | | | | | 21,54 | | | | | |
| Belanja pakaian kerja lapangan | | 5.250.000 | | | | | 4.456.250 | | | | | 84,88 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 7.360.000 | | | | | 7.311.250 | | | | | 99,34 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 77.569.671 | | | | | 74.106.458 | | | | | 95,54 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 14.000.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 304.500.000 | | | | | 263.500.000 | | | | | 86,54 | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | 1.200.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | 30.000.000 | | | | | 13.200.000 | | | | | 44,00 | | | | | |
| Belanja Modal Personal Komputer | | 51.350.000 | | | | | 51.350.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Kegiatan Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik** | | **5.615.000** | | | | | **5.607.500** | | | | | **99,87** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 200.000 | | | | | 200.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | - | | | | | - | | | | | #VALUE! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Kegiatan | | 5.415.000 | | | | | 5.407.500 | | | | | 99,86 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Operasional Maintenance LPSE** | | **48.000.000** | | | | | **43.000.000** | | | | | **89,58** | | | | | |
| Belanja Sewa Rak Collocation Server | | 45.000.000 | | | | | 41.000.000 | | | | | 91,11 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | 3.000.000 | | | | | 2.000.000 | | | | | 66,67 | | | | | |
| **Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan LKPP** | | **-** | | | | | **-** | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Koordinasi Aksi Anti KKN dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa** | | **-** | | | | | **-** | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja dokumen/administrasi tender | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Berstandar ISO 9001** | | **-** | | | | | **-** | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah** | | **177.155.000** | | | | | **152.844.722** | | | | | **86,28** | | | | | |
| **Kegiatan Koordinasi dan** | | **43.250.000** | | | | | **33.118.700** | | | | | **76,58** | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan | | 1.200.000 | | | | | 1.200.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS | | 6.000.000 | | | | | 4.500.000 | | | | | 75,00 | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 1.000.000 | | | | | 500.000 | | | | | 50,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | 1.000.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 1.000.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 6.000.000 | | | | | 1.638.700 | | | | | 27,31 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 5.000.000 | | | | | 4.630.000 | | | | | 92,60 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 3.300.000 | | | | | 1.900.000 | | | | | 57,58 | | | | | |
| Belanja Modal Personal Komputer | | 14.500.000 | | | | | 14.500.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan Personal Komputer | | 4.250.000 | | | | | 4.250.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Kegiatan Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan dan Penanaman Modal** | | **14.500.000** | | | | | **5.781.400** | | | | | **39,87** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 500.000 | | | | | 500.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | 1.500.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 999.000 | | | | | 924.150 | | | | | 92,51 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 4.250.000 | | | | | 1.985.250 | | | | | 46,71 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 2.451.000 | | | | | 2.372.000 | | | | | 96,78 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 1.500.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 2.850.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | 450.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah** | | **119.405.000** | | | | | **113.944.622** | | | | | **95,43** | | | | | |
| Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | 3.350.000 | | | | | 2.750.000 | | | | | 82,09 | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 500.000 | | | | | 500.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | 800.000 | | | | | 68.000 | | | | | 8,50 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 750.000 | | | | | 749.925 | | | | | 99,99 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 4.600.000 | | | | | 1.044.750 | | | | | 22,71 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 5.000.000 | | | | | 4.928.250 | | | | | 98,57 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 7.505.000 | | | | | 7.503.697 | | | | | 99,98 | | | | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | | 95.000.000 | | | | | 94.500.000 | | | | | 99,47 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 1.750.000 | | | | | 1.750.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | 150.000 | | | | | 150.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Program Protokoler dan Dokumentasi** | | **539.590.900** | | | | | **476.670.658** | | | | | **88,34** | | | | | |
| **Kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/ Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN** | | **30.000.000** | | | | | **20.213.000** | | | | | **67,38** | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | 30.000.000 | | | | | 20.213.000 | | | | | 67,38 | | | | | |
| Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah** | | **55.719.900** | | | | | **55.638.000** | | | | | **99,85** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 4.195.000 | | | | | 4.188.000 | | | | | 99,83 | | | | | |
| Belanja cetak | | 11.525.000 | | | | | 11.500.000 | | | | | 99,78 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 999.900 | | | | | 950.000 | | | | | 95,01 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 39.000.000 | | | | | 39.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Keprotokolan** | | **291.791.000** | | | | | **254.757.206** | | | | | **87,31** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 2.500.000 | | | | | 2.467.000 | | | | | 98,68 | | | | | |
| Belanja Jasa Non Pegawai | | 9.650.000 | | | | | 6.500.000 | | | | | 67,36 | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | 233.766.000 | | | | | 204.415.356 | | | | | 87,44 | | | | | |
| Belanja cetak | | 26.375.000 | | | | | 26.375.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 3.000.000 | | | | | 2.999.850 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 16.500.000 | | | | | 12.000.000 | | | | | 72,73 | | | | | |
| **Kegiatan Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Kegiatan Walikota/Wakil Walikota** | | **162.080.000** | | | | | **146.062.452** | | | | | **90,12** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 3.000.000 | | | | | 2.910.000 | | | | | 97,00 | | | | | |
| Belanja dokumen/administrasi tender | | 2.000.000 | | | | | 1.460.000 | | | | | 73,00 | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 5.000.000 | | | | | 4.080.000 | | | | | 81,60 | | | | | |
| Belanja souvenir | | 10.000.000 | | | | | 5.000.000 | | | | | 50,00 | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | 66.080.000 | | | | | 57.041.452 | | | | | 86,32 | | | | | |
| Belanja cetak | | 76.000.000 | | | | | 75.571.000 | | | | | 99,44 | | | | | |
| **Operasional Kantor Penghubung** | | - | | | | | - | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Tamu | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah** | | **60.600.000** | | | | | **55.892.800** | | | | | **92,23** | | | | | |
| **Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah** | | **60.600.000** | | | | | **55.892.800** | | | | | **92,23** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 5.000.000 | | | | | 4.864.000 | | | | | 97,28 | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 300.000 | | | | | 270.000 | | | | | 90,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | 5.400.000 | | | | | 5.400.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 6.000.000 | | | | | 5.700.000 | | | | | 95,00 | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 22.750.000 | | | | | 18.512.550 | | | | | 81,37 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 16.150.000 | | | | | 16.146.250 | | | | | 99,98 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Program Koordinasi Peningkatan** | | - | | | | | | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| **Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik** | | - | | | | | | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat** | | - | | | | | | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Keagamaan** | | **6.778.123.700** | | | | | **5.980.699.426** | | | | | **88,24** | | | | | |
| **Kegiatan SMART SURAU** | | - | | | | | - | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Kontribusi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)** | | **46.450.000** | | | | | **30.010.150** | | | | | **64,61** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 1.600.000 | | | | | 1.600.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 5.500.000 | | | | | 2.880.000 | | | | | 52,36 | | | | | |
| Belanja Hadiah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | 3.600.000 | | | | | 600.000 | | | | | 16,67 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 1.500.000 | | | | | 171.900 | | | | | 11,46 | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 8.750.000 | | | | | 2.378.250 | | | | | 27,18 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Kegiatan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja pakaian khusus | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 25.500.000 | | | | | 22.380.000 | | | | | 87,76 | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Muzakarah Ulama Kota** | | - | | | | | - | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja pakaian khusus | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari-Hari Besar Islam** | | **27.300.000** | | | | | **25.080.300** | | | | | **91,87** | | | | | |
| Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 20.400.000 | | | | | 19.680.000 | | | | | 96,47 | | | | | |
| Belanja bahan baku bangunan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Jasa Event Organizer (EO) | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | 2.600.000 | | | | | 2.600.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 375.000 | | | | | 92.700 | | | | | 24,72 | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa tenda | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 1.875.000 | | | | | 957.600 | | | | | 51,07 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 300.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 1.750.000 | | | | | 1.750.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Kegiatan Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ** | | **7.045.000** | | | | | **6.596.100** | | | | | **93,63** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 480.000 | | | | | 480.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Hadiah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 825.000 | | | | | 391.500 | | | | | 47,45 | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa tenda | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 5.740.000 | | | | | 5.724.600 | | | | | 99,73 | | | | | |
| Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan** | | **97.100.000** | | | | | **87.000.000** | | | | | **89,60** | | | | | |
| Belanja Jasa Publikasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | 21.000.000 | | | | | 16.800.000 | | | | | 80,00 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 50.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Sarung | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 76.050.000 | | | | | 70.200.000 | | | | | 92,31 | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan Gharin/Petugas Kebersihan Mesjid/Mushalla, dan Pengurus Baznas Kota Padang Panjang** | | **5.246.203.750** | | | | | **4.788.255.225** | | | | | **91,27** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 16.416.250 | | | | | 16.402.000 | | | | | 99,91 | | | | | |
| Belanja cetak | | 19.687.500 | | | | | 16.087.500 | | | | | 81,71 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 1.200.000 | | | | | 830.025 | | | | | 69,17 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Makan Minum Rapat | | 8.000.000 | | | | | 3.215.700 | | | | | 40,20 | | | | | |
| Belanja pakaian khusus | | 89.700.000 | | | | | 88.920.000 | | | | | 99,13 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 36.000.000 | | | | | 16.800.000 | | | | | 46,67 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 5.075.200.000 | | | | | 4.646.000.000 | | | | | 91,54 | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji** | | - | | | | | - | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja paket/pengiriman | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Kegiatan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Pembinaan Remaja Mesjid** | | **99.387.000** | | | | | **51.817.550** | | | | | **52,14** | | | | | |
| Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 6.900.000 | | | | | 1.000.000 | | | | | 14,49 | | | | | |
| Belanja Jasa Event Organizer (EO) | | 70.000.000 | | | | | 35.000.000 | | | | | 50,00 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 900.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Makan Minum Kegiatan | | 16.050.000 | | | | | 12.080.775 | | | | | 75,27 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 4.700.000 | | | | | 2.900.000 | | | | | 61,70 | | | | | |
| **Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majlis Taklim Bulanan** | | **28.418.950** | | | | | **28.409.775** | | | | | **99,97** | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 720.000 | | | | | 720.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 117.000 | | | | | 116.775 | | | | | 99,81 | | | | | |
| Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Kegiatan | | 25.681.950 | | | | | 25.673.000 | | | | | 99,97 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 1.900.000 | | | | | 1.900.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Islamic Center** | | **775.850.000** | | | | | **624.742.246** | | | | | **80,52** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 2.500.000 | | | | | 2.241.500 | | | | | 89,66 | | | | | |
| Belanja listrik | | 48.500.000 | | | | | 42.108.000 | | | | | 86,82 | | | | | |
| Belanja Jasa Non Pegawai | | 35.000.000 | | | | | 30.925.000 | | | | | 88,36 | | | | | |
| Upah Pegawai Harian | | 180.900.000 | | | | | 165.960.483 | | | | | 91,74 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 750.000 | | | | | 315.450 | | | | | 42,06 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 8.125.000 | | | | | 7.754.250 | | | | | 95,44 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 15.250.000 | | | | | 15.104.975 | | | | | 99,05 | | | | | |
| Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan | | 90.000.000 | | | | | 40.932.760 | | | | | 45,48 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 256.975.000 | | | | | 182.476.828 | | | | | 71,01 | | | | | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | 137.850.000 | | | | | 136.923.000 | | | | | 99,33 | | | | | |
| **Kegiatan Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran** | | **38.450.000** | | | | | **35.906.950** | | | | | **93,39** | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 600.000 | | | | | 480.000 | | | | | 80,00 | | | | | |
| Belanja Hadiah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Bahan dan Alat Percontohan | | 5.950.000 | | | | | 5.950.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 450.000 | | | | | 42.975 | | | | | 9,55 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 3.750.000 | | | | | 1.927.800 | | | | | 51,41 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Kegiatan | | 18.100.000 | | | | | 17.906.175 | | | | | 98,93 | | | | | |
| Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 9.600.000 | | | | | 9.600.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Kegiatan Subuh Mubarakah** | | **14.970.000** | | | | | **14.940.000** | | | | | **99,80** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 720.000 | | | | | 720.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Jasa Publikasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 13.050.000 | | | | | 13.020.000 | | | | | 99,77 | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 1.200.000 | | | | | 1.200.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Kegiatan Peringatan Hari Santri** | | - | | | | | - | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Hadiah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Jasa Publikasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja cetak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa tenda | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa sound system dan lighting | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota** | | **397.786.000** | | | | | **288.777.905** | | | | | **72,60** | | | | | |
| Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan | | 600.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 27.700.000 | | | | | 27.589.500 | | | | | 99,60 | | | | | |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | 680.000 | | | | | 667.250 | | | | | 98,13 | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | 27.600.000 | | | | | 17.080.000 | | | | | 61,88 | | | | | |
| Belanja Hadiah | | 21.250.000 | | | | | 14.850.000 | | | | | 69,88 | | | | | |
| Belanja Bahan dan Alat Percontohan | | 9.000.000 | | | | | 7.357.000 | | | | | 81,74 | | | | | |
| Belanja Jasa Publikasi | | 4.000.000 | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 906.000 | | | | | 796.500 | | | | | 87,91 | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | 9.000.000 | | | | | 1.400.000 | | | | | 15,56 | | | | | |
| Belanja sewa meja kursi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa tenda | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja sewa sound system dan lighting | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Sewa Pakaian Khusus | | 1.650.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 17.250.000 | | | | | 12.565.575 | | | | | 72,84 | | | | | |
| Belanja pakaian khusus | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 5.000.000 | | | | | 2.282.000 | | | | | 45,64 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 35.000.000 | | | | | 32.390.080 | | | | | 92,54 | | | | | |
| Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat | | 123.000.000 | | | | | 116.000.000 | | | | | 94,31 | | | | | |
| Honorarium Tenaga | | 91.150.000 | | | | | 54.000.000 | | | | | 59,24 | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | 24.000.000 | | | | | 1.800.000 | | | | | 7,50 | | | | | |
| **Program Penyelenggaraan dan Pelaporan Pemerintahan Daerah** | | **216.063.976** | | | | | **161.415.651** | | | | | **74,71** | | | | | |
| **Kegiatan Penyusunan Buku LKPJ Wako** | | **23.589.250** | | | | | **23.204.250** | | | | | **98,37** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 1.300.000 | | | | | 1.300.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | 3.500.000 | | | | | 3.445.000 | | | | | 98,43 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 6.500.000 | | | | | 6.350.000 | | | | | 97,69 | | | | | |
| Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan | | 7.500.000 | | | | | 7.500.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 3.600.000 | | | | | 3.420.000 | | | | | 95,00 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 1.189.250 | | | | | 1.189.250 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)** | | **19.850.000** | | | | | **16.655.325** | | | | | **83,91** | | | | | |
| Belanja alat tulis kantor | | 1.250.000 | | | | | 1.250.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja cetak | | 3.000.000 | | | | | 650.000 | | | | | 21,67 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 1.800.000 | | | | | 1.170.000 | | | | | 65,00 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 6.950.000 | | | | | 6.821.325 | | | | | 98,15 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 2.750.000 | | | | | 2.664.000 | | | | | 96,87 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | 4.100.000 | | | | | 4.100.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Penilaian Kompetensi Camat, Lurah, Sekretaris Lurah dan RT** | | - | | | | | - | | | | | **#DIV/0!** | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Hadiah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| **Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang** | | **128.100.000** | | | | | **79.750.100** | | | | | **62,26** | | | | | |
| Belanja Hadiah | | 55.000.000 | | | | | 50.000.000 | | | | | 90,91 | | | | | |
| Belanja souvenir | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | 9.500.000 | | | | | 4.650.000 | | | | | 48,95 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 2.500.000 | | | | | 1.150.000 | | | | | 46,00 | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 5.000.000 | | | | | 3.146.850 | | | | | 62,94 | | | | | |
| Belanja pakaian khusus | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 5.000.000 | | | | | 4.803.250 | | | | | 96,07 | | | | | |
| Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat | | 31.600.000 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | | 15.000.000 | | | | | 13.000.000 | | | | | 86,67 | | | | | |
| Pengganti Transport Non PNS | | 4.500.000 | | | | | 3.000.000 | | | | | 66,67 | | | | | |
| **Pelaksanaan Kegiatan APEKSI** | | **44.524.726** | | | | | **41.805.976** | | | | | **93,89** | | | | | |
| Belanja Kontribusi | | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | 499.800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | 2.500.200 | | | | | 588.000 | | | | | 23,52 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | 8.000.000 | | | | | 7.693.250 | | | | | 96,17 | | | | | |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | | 8.524.726 | | | | | 8.524.726 | | | | | 100,00 | | | | | |
| **Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah** | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Dekorasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Hadiah | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja cetak | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| Belanja Makan Minum Rapat | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **27.267.231.060** | **30.934.404.170** | **31.343.005.832** | | | **24.328.717.607** | **28.879.969.264** | - | | | **89,22** | **93,36** | - | | |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | - | - | - | - | | | - | - | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 0 | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | - | **14.261.399.850** | **14.896.285.000** | **15.532.706.951** | | | **13.899.185.966** | **14.742.373.456** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **97,46** | **98,97** | - | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN | | | 14.259.600.400 | 14.896.285.000 | 15.532.706.951 | | | 13.897.615.616 | 14.742.373.456 | | | | 97,46 | 98,97 | - | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 1.199.750 | | | | | 1.052.425 | | | | | 87,72 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | 299.900 | | | | | 258.125 | | | | | 86,07 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 299.800 | | | | | 259.800 | | | | | 86,66 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **3.797.167.100** | **5.811.290.550** | **5.830.605.300** | | | **2.633.627.818** | **5.342.468.361** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **69,36** | **91,93** | - | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 41.126.600 | 50.000.000 | 50.000.000 | | | 31.931.000 | 49.965.637 | | | | 77,64 | 99,93 | - | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 22.500.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | | 20.152.610 | 21.647.310 | | | | 89,57 | 86,59 | - | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 100.278.250 | 143.524.750 | 144.263.300 | | | 69.121.060 | 121.316.170 | | | | 68,93 | 84,53 | - | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 42.760.000 | 34.780.800 | 39.975.000 | | | 25.538.700 | 27.815.700 | | | | 59,73 | 79,97 | - | | |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | | | 593.950.000 | 756.085.000 | 1.085.000.000 | | | 541.242.506 | 704.450.018 | | | | 91,13 | 93,17 | - | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.996.552.250 | 4.801.900.000 | 4.486.367.000 | | | 1.945.641.942 | 4.417.273.526 | | | | 64,93 | 91,99 | - | | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **291.784.600** | **375.150.000** | - | | | **245.397.000** | **294.046.400** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **84,10** | **78,38** | **#DIV/0!** | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 291.784.600 | 375.150.000 | - | | | 245.397.000 | 294.046.400 | | | | 84,10 | 78,38 | #DIV/0! | | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **1.551.497.980** | **1.652.354.800** | **1.902.736.600** | - | - | **1.308.349.228** | **1.506.845.353** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **84,33** | **91,19** | - | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 7.500.000 | 12.400.000 | 14.400.000 | | | 7.190.000 | 11.093.150 | | | | 95,87 | 89,46 | - | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 340.424.380 | 275.765.400 | 313.500.000 | | | 308.111.374 | 263.342.503 | | | | 90,51 | 95,50 | - | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 502.069.200 | 585.114.200 | 618.914.200 | | | 362.913.976 | 506.217.219 | | | | 72,28 | 86,52 | - | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 701.504.400 | 779.075.200 | 955.922.400 | | | 630.133.878 | 726.192.481 | | | | 89,83 | 93,21 | - | | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **1.911.391.200** | **2.350.100.700** | **2.454.001.761** | - | - | **1.631.488.275** | **2.006.188.159** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **85,36** | **85,37** | - | | |
| Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.623.171.200 | 1.980.210.700 | 2.122.601.761 | | | 1.469.131.110 | 1.666.706.249 | | | | 90,51 | 84,17 | - | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 95.220.000 | 87.890.000 | 104.400.000 | | | 29.386.027 | 74.963.085 | | | | 30,86 | 85,29 | - | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 193.000.000 | 282.000.000 | 227.000.000 | | | 132.971.138 | 264.518.825 | | | | 68,90 | 93,80 | - | | |
| **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | **830.610.000** | **869.610.000** | **776.660.000** | - | - | **806.919.643** | **849.860.762** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **97,15** | **97,73** | - | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 174.160.000 | 174.160.000 | 174.160.000 | | | 170.377.992 | 169.626.616 | | | | 97,83 | 97,40 | - | | |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 256.450.000 | 295.450.000 | 202.500.000 | | | 236.541.655 | 280.234.150 | | | | 92,24 | 94,85 | - | | |
| PPenyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | | 399.999.996 | 399.999.996 | | | | 100,00 | 100,00 | - | | |
| **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | **3.170.558.480** | **3.367.931.500** | **3.464.401.400** | - | - | **2.631.570.940** | **2.719.589.135** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **83,00** | **80,75** | - | | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | 2.063.097.480 | 2.048.127.200 | 2.277.828.600 | | | 1.693.302.062 | 1.689.265.393 | | | | 82,08 | 82,48 | - | | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | 1.084.386.000 | 1.265.624.300 | 1.136.392.800 | | | 925.372.128 | 987.315.914 | | | | 85,34 | 78,01 | - | | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | 23.075.000 | 54.180.000 | 50.180.000 | | | 12.896.750 | 43.007.828 | | | | 55,89 | 79,38 | - | | |
| **Penataan Organisasi** | | | **760.793.850** | **621.359.070** | **485.690.500** | - | - | **577.652.735** | **495.974.077** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **75,93** | **79,82** | - | | |
| Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 104.855.600 | 171.048.870 | 71.029.350 | | | 58.443.416 | 138.270.207 | | | | 55,74 | 80,84 | - | | |
| Fasilitasi Pelayanan Publik danTata Laksana | | | 470.899.150 | 282.253.700 | 264.565.800 | | | 436.635.364 | 256.866.191 | | | | 92,72 | 91,01 | - | | |
| Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | 185.039.100 | 168.056.500 | 150.095.350 | | | 82.573.955 | 100.837.679 | | | | 44,63 | 60,00 | - | | |
| **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | **692.028.000** | **511.563.850** | **582.557.220** | - | - | **594.526.002** | **922.623.561** | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **85,91** | **180,35** | - | | |
| Fasilitasi Keprotokolan | | | 391.018.000 | 511.563.850 | 582.557.220 | | | 350.163.308 | 465.472.271 | | | | 89,55 | 90,99 | - | | |
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | 87.575.000 | 80.400.000 | 73.109.200 | | | 68.775.000 | 79.050.000 | | | | 78,53 | 98,32 | - | | |
| Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | 213.435.000 | 398.358.700 | 240.536.900 | | | 175.587.694 | 378.101.290 | | | | 82,27 | 94,91 | - | | |
| **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | **27.253.196.140** | **13.632.975.580** | **15.438.050.019** | | | **22.442.746.224** | **12.929.867.510** | - | | | 82,35 | 94,84 | - | | |
| **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | **211.843.800** | **331.033.700** | **170.601.500** | - | - | **178.554.716** | **278.677.645** | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **84,29** | **84,18** | - | | |
| Penataan Administrasi Pemerintahan | | | 71.000.000 | 112.238.000 | 83.577.500 | | | 60.094.000 | 94.434.350 | | | | 84,64 | 84,14 | - | | |
| Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | 12.050.000 | 17.870.000 | 22.270.000 | | | 6.162.700 | 9.544.000 | | | | 51,14 | 53,41 | - | | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | 128.793.800 | 200.925.700 | 64.754.000 | | | 112.298.016 | 174.699.295 | | | | 87,19 | 86,95 | - | | |
| **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | **26.657.604.640** | **12.670.972.030** | **14.781.898.219** | - | - | **22.112.388.279** | **12.163.109.248** | - | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **82,95** | **95,99** | - | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | 17.287.199.790 | 2.376.375.880 | 4.503.769.530 | | | 13.995.717.259 | 2.195.543.444 | | | | 80,96 | 92,39 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | 2.324.293.850 | 783.669.400 | 2.292.107.089 | | | 1.896.700.520 | 725.469.400 | | | | 81,60 | 92,57 | - | | |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | 7.046.111.000 | 9.510.926.750 | 7.986.021.600 | | | 6.219.970.500 | 9.242.096.404 | | | | 88,28 | 97,17 | - | | |
| **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | | | **383.747.700** | **630.969.850** | **485.550.300** | **-** | **-** | **151.803.229** | **488.080.617** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **39,56** | **77,35** | **-** | | |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | 86.785.500 | 78.950.250 | 43.000.050 | | | 54.441.460 | 47.764.915 | | | | 62,73 | 60,50 | - | | |
| Fasilitasi Bantuan Hukum | | | 235.981.300 | 498.425.000 | 388.955.950 | | | 73.552.350 | 411.668.152 | | | | 31,17 | 82,59 | - | | |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | 60.980.900 | 53.594.600 | 53.594.300 | | | 23.809.419 | 28.647.550 | | | | 39,04 | 53,45 | - | | |
| **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | **584.600.000** | **892.190.800** | **736.622.400** | | | **384.973.420** | **665.063.385** | **-** | | | **65,85** | **74,54** | **-** | | |
| **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | | **108.334.400** | **193.583.700** | **141.457.000** | **-** | **-** | **63.225.850** | **145.921.941** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **58,36** | **75,38** | **-** | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | 68.077.700 | 109.019.400 | 82.822.000 | | | 49.000.050 | 98.192.791 | | | | 71,98 | 90,07 | - | | |
| Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | 20.128.350 | 61.530.400 | 45.319.000 | | | 14.225.800 | 39.996.900 | | | | 70,68 | 65,00 | - | | |
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | 20.128.350 | 23.033.900 | 13.316.000 | | | | 7.732.250 | | | | - | 33,57 | - | | |
| **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | | | **392.765.550** | **371.879.400** | **335.473.900** | **-** | **-** | **249.679.820** | **260.775.955** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **63,57** | **70,12** | **-** | | |
| Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | 392.765.550 | 371.879.400 | 335.473.900 | | | 249.679.820 | 260.775.955 | | | | 63,57 | 70,12 | - | | |
| **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | | | **67.843.050** | **273.384.200** | **217.006.000** | **-** | **-** | **58.654.000** | **230.579.539** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **86,46** | **84,34** | **-** | | |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 19.144.050 | 47.029.400 | 5.862.000 | | | 15.250.000 | 36.259.735 | | | | 79,66 | 77,10 | - | | |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | 48.699.000 | 87.399.250 | 100.424.000 | | | 43.404.000 | 85.665.164 | | | | 89,13 | 98,02 | - | | |
| Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 138.955.550 | 110.720.000 | | | | 108.654.640 | | | | #DIV/0! | 78,19 | - | | |
| **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | | | **15.657.000** | **53.343.500** | **42.685.500** | **-** | **-** | **13.413.750** | **27.785.950** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **85,67** | **52,09** | **-** | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | 15.657.000 | 53.343.500 | 42.685.500 | | | 13.413.750 | 27.785.950 | | | | 85,67 | 52,09 | - | | |

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagai Fungsi koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Padang Panjang. Kondisi tersebut dapat menjadikan tantangan dan memberi peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah. Bentuk tantangan pelayanan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

**Tantangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupaya mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja kebijakan SDA/LH, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan, mengembangkan ekonomi, membina BUMD serta mewujudkan kehidupan manusia yang Islami.
6. Meningkatkan Tertib Administrasi dan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

7. Meningkatkan fasilitasi kegiatan Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat.

**Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
3. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
4. Tersedianya Anggaran

## 2.5. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinir pelaksanaan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, adapun kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Lembaga keagamaan
4. Mesjid, Musholla
5. Perusahaan penyedia barang/jasa
6. BUMD, BLUD
7. Pelajar, Mahasiswa
8. Masyarakat

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali analisis isu-isu strategis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2024-2026

## 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, maka dapat diidentifikasii permasalahan sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

   Penyusunan kebijakan belum begitu optimal. Tak jarang kebijakan yang muncul dari OPD belum dibahas secara komprehensif dengan melibatkan unsur Sekretariat Daerah dan unsur terkait lainya. Sehingga rumusan kebijakan yang dikeluarkan belum mampu mengantisipasi atau sebagai solusi terhadap seluruh permasalahan yang ada.

b. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD dengan Sekretariat Daerah.

   Alur koordinasi antar perangkat daerah dengan Sekretariat sebagai fungsi koordinasi perlu ditingkatkan. Masih ada beberapa kegiatan pada OPD yang hanya diketahui langsung oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atau Asisten tidak diketahui oleh Kepala Bagian sehingga belum

optimalnya perumusan kebijakan yang dikeluarkan dan pelaksanaan kegiatan.

c. Beberapa nilai capaian dari indikator penilaian Pemerintah Pusat seperti Nilai SAKIP dan Nilai Refermasi Birokrasi masih berada pada Kategori Cukup dan Baik belum Sangat Baik. Dan ini dipengaruhi oleh banyak faktor dimana pencapaian nilai tersebut merupakan akumulatif dari kinerja seluruh Perangkat Daerah. Banyak hal yang perlu dipelajari disamping komitmen untuk menyiapkan dan melaksanakan seluruh indikator-indikator yang merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan.
d. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat.
   Belum optimalnya peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dimana hal ini disebabkan karena keterbatasan dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dimana pada waktu sosialisasi pra penetapan peraturan yang dibahas bersama masyarakat tidak begitu banyak masyarakat yang hadir.
e. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah.
   Kelembagaan penataan daerah perlu dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan situasi. Namun karena keterbatasan anggaran sehingga hal ini sulit dilakukan apalagi hasil evaluasi merekomendasikan pengembangan kelembagaan.
f. Implementasi Penyederhanaan birokrasi yang masih memerlukan aturan dan dukungan dari Pemerintah Pusat.
g. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja yang terdokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

### 3.2. Telaahan Renstra Propinsi

Penelaahan Dokumen perencanaan Renstra Sekretariat Daerah dengan Renstra Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menyelaraskan dan dapat memberikan dukungan pencapaian Visi, Misi Propinsi. Adapun Visi dari Gubernur Sumatera barat adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Dari Visi ini ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan

Falsafah Adaik Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;

3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital.;
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

## 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai fungsi kordinasi ada Program yang berhubungan dangan tataruang yaitu Penataan Daerah Otonomi Baru.

## 3.4. Isu-Isu Strategis

Dalam perumusan isu-isu strategis diperlukan sebuah kajian dan analisis untuk dapat mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan dan Peluang serta Tantangan yang ada, Pendekatan yang lazim dilakukan dalam analisis Isu Stategis adalah Analisis SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunity and Threat). sebuah analisis yang membagi dua analisis yakni analisis terhadap lingkungan internal berupa kekuatan (strenght) dan kelemahan (weaknesses) serta melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Dengan pendekatan tersebut pada yang menjadi Isu

strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dapat sebagai berikut :

**A. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas hidup masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:**

1. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Belum optimalnya perumusan kebijakan dan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat, bina mental dan spiritual.
3. Belum optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

**B. Belum optimalnya pencapaian pembangunan daerah, dengan rician sebagai berikut:**

1. Belum optimalnya Perumusan kebijakan dan pelayanan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Belum optimalnya perumusan kebijakan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Belum optimalnya perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pembangunan.

**C. Belum optimalnya pencapaian pembangunan daerah, dengan rincian sebagai berikut:**

1. Belum optimalnya pengembangan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik dan penataan ketataksanaan.
2. Belum optimalnya penataan organisasi.
3. Belum optimalnya pelayanan administrasi umum.
4. Belum optimalnya pelayanan administrasi keprotokoleran.

# BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Maka dengan potensi, peluang, tantangan dan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama 3 (tiga tahun) ke depan sebagai mana Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**
**Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | KONDISI EKSISTING | TARGET KINERJA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | | Nilai SAKIP | | 63,98 | 64,86 | 65,74 |
| | | | Nilai RB | | 57,62 | 58,82 | 60,02 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik | 85 | 90 | 93 | 95 |
| | | | Nilai LPPD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat | 95,33 | 95,70 | 96,00 | 96,50 |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian | Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat | | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan | | 85 | 90 | 95 |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat | Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang diterapkan | | 100 | 100 | 100 |

## 4.2. Cascading

Proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan dapat diuraikan pada table dibawah ini :

# CASCADING RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Nilai SAKIP | | | |
| TARGET | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Target Akhir |
| | 63,98 | 64,86 | 65,74 | 65,74 |
| IK | Nilai Reformasi Birokrasi | | | |
| TARGET | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Target Akhir |
| | 57,62 | 58,82 | 60,02 | 60,02 |

| TUJUAN | Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Masjid Yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Agama | | | |
| TARGET | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Target Akhir |
| | 85% | 90% | 95% | 95% |

| SASARAN | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | | | |
| TARGET | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Target Akhir |
| | 95,70 | 96,00 | 96,50 | 96,50 |
| IK | NILAI LPPD | | | |
| TARGET | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Target Akhir |
| | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |

| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah | | | |
| TARGET | 95% | 95% | 95% | 95% |

| Kegiatan Penataan Organisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku | | | |
| TARGET | 65% | 75% | 85% | 85% |

| Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan | | | |
| TARGET | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 12 Dokumen |

| Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana | | | |
| TARGET | 4 Laporan | 5 Laporan | 3 Laporan | 12 Laporan |

| Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi | | | |
| TARGET | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 13 Dokumen |

| Kegiatan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | |
| TARGET | 300 Laporan | 144 Laporan | 300 Laporan | 744 laporan |

| Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | |
| TARGET | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 3 Laporan |

| Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | |
| TARGET | 1 Laporan | 6 Laporan | 6 Laporan | 13 Laporan |

| SASARAN | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Terselenggaranya Kebijakan Umum Sektor Perekonomian Dan Pembangunan | | | |
| TARGET | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Target Akhir |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |

| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan | | | |
| TARGET | 60% | 75% | 90% | 90% |

| Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian | | | |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | |
| TARGET | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3 Dokumen |

| Sub Kegiatan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian | | | |
| TARGET | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 3 Laporan |

| Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan | | | |
| TARGET | 90% | 90% | 90% | 90% |

| Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | |
| TARGET | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3 Dokumen |

| Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | | | |
| TARGET | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3 Dokumen |

| Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan | | | |
| TARGET | 90% | 90% | 90% | 90% |

| Sub Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | |
| TARGET | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 36 Laporan |

| Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa | | | |
| TARGET | 90% | 90% | 90% | 90% |

| Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa | | | |
| TARGET | 250 Dokumen | 300 Dokumen | 320 Dokumen | 870 Dokumen |

| Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | |
| TARGET | 90 Dokumen | 90 Dokumen | 90 Dokumen | 270 Dokumen |

| Sub Kegiatan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa | | | |
| TARGET | 220 Orang | 230 Orang | 250 Orang | 250 Orang |

| SASARAN | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Diterapkan | | | |
| TARGET | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Target Akhir |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |

| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | | | |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | |
| TARGET | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6 Dokumen |

| Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | |
| TARGET | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 9 Dokumen |

| Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | |
| TARGET | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 21 Dokumen |

| Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | |
| TARGET | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 21 Dokumen |

| Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | |
| TARGET | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15 Dokumen |

| Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | |
| TARGET | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 21 Dokumen |

| Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana | | | |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | |
| TARGET | 70 Dokumen | 70 Dokumen | 70 Dokumen | 210 Dokumen |

| Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Laporan Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | |
| TARGET | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 9 Laporan |

| Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Produk Hukum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IK | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi | | | |
| TARGET | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 30 Dokumen |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Secara spesifik, kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman pelaksanaan, berisikan tindakan-tindakan tertentu, sehingga kebijakan tersebut dapat berupa kumpulan keputusan yang mempunyai sifat-sifat :

1. Berupa pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan
3. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
4. mengarah kepada kondisi-kondisi dimana para pelaksana yang akan melaksanakan mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan Sekretariat Daerah merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka menurut targetnya, kebijakan Sekretariat Daerah terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang diakomodir dan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Sedangkan kebijakan eksternal pada umumnya kebijakan yang diterbitkan dan diarahkan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan SOPD dan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan yang telah dirumuskan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan Rencana Strategis yang efektif, sehingga elemen Strategi pada dasarnya meliputi :

- upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;
- Sebagai hasil tindak lanjut perumusan faktor kunci keberhasilan, misi dan visi organisasi, yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan;
- harus mampu untuk memberikan arah dan dorongan kepada pelaksana

kegiatan; dan

- dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan itu, maka strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**
**Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif | Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, dan asistensi pelaporan SAKIP Perangkat Daerah |
| | | | Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, dan asistensi pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi |
| | | | Peningkatan kualitas pelayanan publik dan ketatalaksanaan |
| | | Peningkatan koordinasi dan fasilitasi hukum | Peningkatan pembinaan koordinasi, bantuan hukum, dan pelaksanaan HAM |
| | | | Peningkatan layanan dan dokumentasi hukum |
| | | | Peningkatan fasilitasi koordinasi dan penyusunan produk hukum |
| | | Optimalisasi perumusan kebijakan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa | Peningkatan pengelolaan barang/jasa dan layanan pengadaan secara elektronik yang menggunakan komponen dalam negeri |
| | | | Peningkatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa |
| | | Optimalisasi pelayanan keprotokolan | Peningkatan pelayanan keprotokoleran, komunikasi dan dokumentasi |
| | | Optimalisasi perumusan kebijakan dan pelayanan di bidang administrasi pembangunan | Peningkatan kualitas penyusunan dan pelaporan program pembangunan daerah |
| | | Optimalisasi perumusan kebijakan dan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan | Peningkatan pelayanan dan kerjasama otonomi daerah |
| | | | Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan kewilayahan |
| | | Optimalisasi pelayanan administarasi umum dan keuangan | Peningkatan pelayanan umum dan keuangan sekretariat daerah |
| | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian | Optimalisasi perumusan kebijakan ekonomi dan SDA | Menyelenggarakan perencanaan dan monitoring program koordinasi perekonomian daerah |
| | | | Mengkoordinasikan penyelenggaraan inflasi daerah |
| | | | Mendorong penguatan ketersediaan data sektor perekonomian |
| Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat | Optimalisasi perumusan kebijakan dan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat | Peningkatan pembinaan mental spiritual dan kesejahteraan sosial dan masyarakat |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan adanya strategi dan kebijakan yang ingin dicapai, maka disusun Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk tiga tahun kedepan. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2024-2026. Berdasar rumusan Tujuan, Sasaran yang telah dirumuskan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dijabarkan menjadi Program kegiatan. Program Kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan adalah sebagai Tabel 6.1.

# Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah**
**Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** | | | | | | | | | | | | | | | Kota Padang Panjang |
| | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** | | | | | | **32.281.880.535** | | **38.778.516.535** | | **40.501.236.535** | | **198.157.147.543** | | Kota Padang Panjang |
| | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi** | | **100%** | **23.799.566.535** | **90%** | **30.513.886.535** | **90%** | **32.894.886.535** | | **87.208.339.605** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah** | | **90%** | **13.546.584.774** | **90%** | **13.546.584.774** | **90%** | **13.546.584.774** | | **40.639.754.322** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 110 orang | 13.546.584.774 | 110 orang | 13.546.584.774 | 110 orang | 13.546.584.774 | | 40.639.754.322 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran** | | **90%** | **2.725.200.000** | **90%** | **5.760.000.000** | **90%** | **5.501.000.000** | | **13.986.200.000** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | | 1 paket | 50.000.000 | 1 paket | 50.000.000 | 1 paket | 50.000.000 | | 150.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang diadakan | | 3 paket | 30.000.000 | 3 paket | 30.000.000 | 3 paket | 30.000.000 | | 90.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | | 1 paket | 145.000.000 | 1 paket | 145.000.000 | 1 paket | 145.000.000 | | 435.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | 1 paket | 20.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | | 90.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah penerimaan kunjungan tamu yang di fasilitasi | | 500 kali | 500.000.000 | 500 kali | 1.000.000.000 | 500 kali | 1.000.000.000 | | 2.500.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koorsinasi dan konsultasi | | 1 Dokumen | 1.980.200.000 | 1 dokumen | 4.500.000.000 | 1 dokumen | 4.241.000.000 | | 10.721.200.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah makanan dan minuman rapat yang difasilitasi | | 200 kali | | 200 kali | | 200 kali | | | | | |
| | | | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemenuhan barang milik daerah** | | **80%** | **70.000.000** | **80%** | **2.020.000.000** | **80%** | **4.600.000.000** | | **6.690.000.000** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan | | 1 Unit | - | 2 unit | 2.000.000.000 | 9 Unit | 4.500.000.000 | | 6.500.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan | | 1 Unit | - | - | - | - | - | | - | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan | | | 70.000.000 | - | 20.000.000 | - | 100.000.000 | | 190.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | 4 Unit | - | 2 Unit | - | 2 Unit | - | | - | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | 2 Unit | - | 2 Unit | - | 2 Unit | - | | - | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | 2 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | | - | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | 16 Unit | - | 10 Unit | - | 10 Unit | - | | - | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | 16 Unit | - | 10 Unit | - | 10 Unit | - | | - | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | | **90%** | **1.590.220.000** | **90%** | **1.590.220.000** | **90%** | **1.595.220.000** | | **4.775.660.000** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000 | 1 dokumen | 15.000.000 | | 35.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | | 1 dokumen | 313.500.000 | 1 dokumen | 313.500.000 | 1 dokumen | 313.500.000 | | 940.500.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan | | 1 dokumen | 510.000.000 | 1 dokumen | 510.000.000 | 1 dokumen | 510.000.000 | | 1.530.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | | 1 dokumen | 756.720.000 | 1 dokumen | 756.720.000 | 1 dokumen | 756.720.000 | | 2.270.160.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah** | | **100%** | **2.393.241.761** | **100%** | **2.403.241.761** | **100%** | **2.403.241.761** | | **7.199.725.283** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | | 82 unit | 1.993.241.761 | 82 unit | 1.993.241.761 | 82 unit | 1.993.241.761 | | 5.979.725.283 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | | 9 jenis | 100.000.000 | 9 jenis | 110.000.000 | 9 jenis | 110.000.000 | | 320.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | | 4 unit | 300.000.000 | 4 unit | 300.000.000 | 4 unit | 300.000.000 | | 900.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | **Kegiatan Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah** | | **90%** | **-** | **90%** | **-** | **90%** | **55.000.000** | | **55.000.000** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah orang yang menerima pakaian dinas | | 110 orang | - | 110 orang | - | 110 orang | 55.000.000 | | 55.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi** | | **2 orang** | **400.000.000** | **2 orang** | **800.000.000** | **2 orang** | **800.000.000** | | **2.000.000.000** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 2 orang | 100.000.000 | 2 orang | 200.000.000 | 2 orang | 200.000.000 | | 500.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan | | 1 paket | 100.000.000 | 1 paket | 200.000.000 | 1 paket | 200.000.000 | | 500.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 2 orang | 200.000.000 | 2 orang | 400.000.000 | 2 orang | 400.000.000 | | 1.000.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Jumlah Rumah Tangga yang difailitasi** | | **3 objek** | **2.070.480.000** | **3 objek** | **3.270.000.000** | **3 objek** | **3.270.000.000** | | **8.610.480.000** | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan | | 1 paket | 1.835.600.000 | 1 paket | 2.000.000.000 | 1 paket | 2.000.000.000 | | 5.835.600.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan | | 1 paket | 164.880.000 | 1 paket | 1.200.000.000 | 1 paket | 1.200.000.000 | | 2.564.880.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan | | 1 paket | 70.000.000 | 1 paket | 70.000.000 | 1 paket | 70.000.000 | | 210.000.000 | Bagian Umum | Kota Padang Panjang |
| | | | **Kegiatan Penataan Organisasi** | **Persentase penataan organisasi yang tepat sesuai Peraturan yang berlaku** | **58** | **65** | **360.000.000** | **75** | **480.000.000** | **85** | **480.000.000** | | **1.320.000.000** | **Bagian Organisasi** | **Kota Padang Panjang** |
| | | | Subkegiatan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan | Jumlah Dokumen pengelolaan klembagaan dan Analisis Jabatan | 2 dokumen | 5 dokumen | 50.000.000 | 4 Dokumen | 70.000.000 | 3 Dokumen | 70.000.000 | | 190.000.000 | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | Subkegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana | 3 dokumen | 4 dokumen | 260.000.000 | 5 dokumen | 260.000.000 | 3 dokumen | 260.000.000 | | 780.000.000 | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | Subkegiatan Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi | Jumlah Dokumen hasil peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi | 5 dok | 5 dok | 50.000.000 | 4 dok | 150.000.000 | 4 dok | 150.000.000 | | 350.000.000 | Bagian Organisasi | Kota Padang Panjang |
| | | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota. | | | **643.840.000** | | **643.840.000** | | **643.840.000** | | **1.931.520.000** | | |
| | | | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan | | 300 Kegiatan | 421.520.000, | 144 kegiatan | 421.520.000, | 300 Kegiatan | 421.520.000, | 300 Kegiatan | 1.264.560.000 | Bag. Prokopim | Padang Panjang |
| | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah dokumen pidato yang disusun. | | 1 Dokumen | 70.000.000, | 1 Dokumen | 70.000.000, | 1 Dokumen | 70.000.000, | 1 Dokumen | 210.000.000 | Bag. Prokopim | Padang Panjang |
| | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah jenis publikasi kegiatan Wako/Wawako yang didokumentasikan. | | 1 Dokumen | 152.320.000, | 6 jenis | 152.320.000, | 6 jenis | 152.320.000, | 6 jenis | 456.960.000 | Bag. Prokopim | Padang Panjang |
| | | | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor pemerintahan Kesejahteraan Rakyat** | | **100%** | **8.097.314.000** | **100%** | **7.894.630.000** | **100%** | **7.221.350.000** | **100%** | **109.813.807.938** | **Administrasi Pemerintahan** | Kota Padang Panjang |
| | | | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | | 100% | **114.800.000** | 100% | **257.000.000** | 100% | **259.000.000** | 100% | **87.231.313.938** | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan/penghargaan daerah | | 10 orang | 40.000.000 | 10 orang | 80.000.000 | 10 orang | 80.000.000 | 10 orang | 29.077.104.646 | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah peringatan HUT RI dan hari jadi kota Padang Panjang yang dilaksanakan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Camat dan Urah yang dinilai Kompetensinya | | 18 orang | 25.000.000 | 18 orang | 27.000.000 | 18 orang | 29.000.000 | 18 orang | 29.077.104.646 | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah dokumen pembentukan koordinat titik batas wilayah yang di susun | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah bidang fasilitasi dan laporan pencapaian SPM | | 6 bidang dan 1 dokumen | 49.800.000 | 6 bidang dan 1 dokumen | 150.000.000 | 6 bidang dan 1 dokumen | 150.000.000 | 6 bidang dan 1 dokumen | 29.077.104.646 | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah ( LPPD ) dan ( Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah ) RLPPD yang di susun | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah dokumen LKPJ dan Buku Nota LKPJ | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah, Eksekutif dan Legislatif | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah fasilitasi Kerjasama | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah fasilitasi kegiatan APEKSI pusat dan APEKSI Wilayah | | 15 Kegiatan | | 15 Kegiatan | | 15 Kegiatan | | 15 Kegiatan | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| | | | | Jumlah fasilitasi kegiatan RAKOR Pemerintahan Pusat dan Daerah | | 10 Kegiatan | | 10 Kegiatan | | 10 Kegiatan | | 10 Kegiatan | | Administrasi Pemerintahan | Kota Padang Panjang |
| **Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat** | | | | Persentase Pemajuan Kebudayaan | | | **7.607.514.000** | | **7.262.630.000** | | **6.587.350.000** | | **21.457.494.000** | | |
| | **Optimalisasi peran lembaga keagamaan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | | | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | **7.607.514.000** | 100% | **7.262.630.000** | 100% | **6.587.350.000** | 100% | **21.457.494.000** | | |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 7 dokumen | 7 dokumen | 1.345.614.000 | 7 dokumen | 1.500.000.000 | 7 dokumen | 1.500.000.000 | 7 dokumen | 4.345.614.000 | | |
| | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas | 3 dokumen | 5 dokumen | 375.200.000 | 5 dokumen | 400.000.000 | 5 dokumen | 400.000.000 | 5 dokumen | 1.175.200.000 | | |
| | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum | 1 dokumen | 7 dokumen | 5.886.700.000 | 7 dokumen | 5.362.630.000 | 7 dokumen | 4.687.350.000 | 7 dokumen | 15.936.680.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** | | | | | | | **375.000.000** | | **375.000.000** | | **375.000.000** | | **1.125.000.000** | | Kota Padang Panjang |
| | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** | | | | | | | | | | | | | Bagian Hukum | |
| | | 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Laporan Fasiltasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerindah Daerah, dan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, serta Nilai Capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM | 3 Laporan | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 900.000.000 | Bagian Hukum | Kota Padang Panjang |
| | | 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi penyusunannya | 35 dokumen | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 150.000.000 | Bagian Hukum | Kota Padang Panjang |
| | | 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 2 dokumen | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 75.000.000 | Bagian Hukum | Kota Padang Panjang |
| Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | | | | Predikat sistem akuntablitas kinerja pemerintah | | | | | | | | | | | Kota Padang Panjang |
| | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan SDA | | | Persentase Terselenggaranya Kebijakan Umum sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Panjang | | | **385.000.000** | | **370.000.000** | | **385.000.000** | | **1.135.000.000** | | Kota Padang Panjang |
| | | | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | | | **60%** | **385.000.000** | **75%** | **370.000.000** | **90%** | **385.000.000** | | **345.000.000** | | Kota Padang Panjang |
| | | | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | **60.000.000** | | **55.000.000** | | **55.000.000** | | **170.000.000** | | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | 1 dokumen | 30.000.000 | 1 dokumen | 30.000.000 | 1 dokumen | 30.000.000 | | 90.000.000 | Bag Perekonomian dan SDA | Kota Padang Panjang |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | 1 dokumen | | | | | | | - | Bag Perekonomian dan SDA | Kota Padang Panjang |
| | | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | 1 dokumen | 30.000.000 | 1 dokumen | 25.000.000 | 1 dokumen | 25.000.000 | | 80.000.000 | Bag Perekonomian dan SDA | Kota Padang Panjang |
| | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | 1 dokumen | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | **55.000.000** | | **55.000.000** | | **70.000.000** | | **175.000.000** | | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, | | 1 dokumen | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 105.000.000 | Bag Perekonomian dan SDA | Kota Padang Panjang |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 30.000.000 | | 70.000.000 | Bag Perekonomian dan SDA | Kota Padang Panjang |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor pembangunan | | | | | | **50.000.000** | | **50.000.000** | | **50.000.000** | | **150.000.000** | | Kota Padang Panjang |
| | | | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase pelayanan adminsitrasi pembangunan yang dilaksanakan | | | | | | | | | | Bagian Administrasi Pembangunan | Kota Padang Panjang |
| | | | Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan | | 95% | | 95% | | 95% | | | | Bagian Administrasi Pembangunan | Kota Padang Panjang |
| | | | | | | 12 kali | 50.000.000 | 12 kali | 50.000.000 | 12 kali | 50.000.000 | | 150.000.000 | Bagian Administrasi Pembangunan | Kota Padang Panjang |
| | **Meningkatnya kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah** | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Capaian Kegiatan : | | | | | | | | | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |
| | | | | Persentase pencapaian kegiatan pembangunan | 90% | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |
| | | | | Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan | 90% | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |
| | | | | Masukan : Dana yang dibutuhkan | 217.006.000 | | **220.000.000** | | **210.000.000** | | **210.000.000** | | **640.000.000** | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |
| | | | | Keluaran : Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |
| | | | | Hasil : Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |
| | | 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 250 dokumen | 250 dokumen | 20.000.000 | 300 dokumen | 10.000.000 | 320 dokumen | 10.000.000 | 250 dokumen | 40.000.000 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |
| | | 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 90 dokumen | 90 dokumen | 100.000.000 | 90 dokumen | 100.000.000 | 90 dokumen | 100.000.000 | 90 dokumen | 300.000.000 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |
| | | 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa `<br>Jumlah Sarana Pendukung : Komputer | 110 orang<br>- | 220 orang<br>20 unit | 100.000.000 | 230 orang<br>- | 100.000.000 | 250 orang<br>- | 100.000.000 | 110 orang | 300.000.000 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Padang Panjang |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026.

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026**
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN) | DEFENISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | URUSAN | SUMBER DATA | |
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (10) | (11) |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Sakip | Nilai | cukup jelas | Penilaian dari Menpan RB | 1/3 dari jumlah OPD menadapat nilai baik=B, 1/2dari jumlah OPD menadapat nilai B=BB,seluruh OPD | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Nilai LPPD | Nilai | cukup jelas | Penilaian dari Kemendgri | Penilaian dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penilaian Propinsi dan dilanjutkan dengan penilaian oleh Kementerian Dalam negeri terhadap kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat | Nilai | Permenpan RB No, 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Jumlah rata-rata SKM Tingkat Kota | Total Nilai Indeks Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berbanding total UKPP yang disurvey * 100 | | | |
| 2 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian | Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang | % | cukup jelas | Total kegiatan sektor perekonomian yang terlaksana berbanding total kebijakan sektor perekonomian x 100 | Total kegiatan yang dilaksanakan berbanding total kegiatan x 100 | | | |
| 3 | Meningkatnya aktifitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat | Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid | % | cukup jelas | Jumlah lembaga keagamaan (TPQ, wirid remaja, kampung tahfidz, majelis ta'lim, subuh mubarakah, BP4) dibandingkan dengan lembaga keagamaan yg ada | Jumlah lembaga keagamaan yang aktif/ lembaga keagamaan yg ada x 100 | | | |

# BAB VIII
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 3 (tiga) tahunyang bersifat teknis strategis yang disusun berdasarkan kondisi eksisting, analisis lingkungan strategis serta mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan Kota Padang Panjang. Renstra ini disusun dengan harapan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis ini juga merupakan acuan bagi Sekretariat Daerah berikut dengan seluruh unsur staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Strategis secara proporsional dan profesional tentunya sangat membutuhkan komitmen dan dukungan bersama, baik dari unsur pimpinan beserta seluruh staf, ketersediaan SDM Aparatur, dana, sarana dan prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, maupun dukungan dari seluruh Perangkat Daerah.

Untuk melihat tingkat kemajuan atau capaian dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga efektifitas pelaksanaannya, diperlukan suatu sistem atau mekanisme pengendalian yang komprehensif dan evaluasi secara berkala.

Pengendalian dan Evaluasi dimaksud dilaksanakan baik dalam periode tahunan maupun lima tahunan sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas.

Padang Panjang,  Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

**SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si.**

**Pembina Utama Madya / NIP. 19750331 199501 1 001**